

Jl. Soekarno Hatta no. 592 Bandung Telp. (022) 7504777, 7506307 Fax. (022) 7563333

E-mail : info@jamkrida-jabar.co.id Website : www.jamkrida-jabar.co.id

Nomor

: S-1751/DIRKEU/JJ/IV/2018

: Segera

Sifat Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Laporan Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik Tahun 2017

Kepada Yth.

Direktur Pengawasan Lembaga

Keuangan Khusus (DLKK) Otoritas Jasa Keuangan

Bandung, 25 April 2018

Gedung Wisma Mulia 2 Lt. 15 Jalan Gatot Subroto No. 42 RT.03 RW.02 Kuningan Barat

Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan Jakarta 12710

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Bab XVII Pasal 57 & 58 mengenai Pelaporan, terlampir kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami, PT Jamkrida Jabar

<u>Budi Setyono</u> Direktur Keuangan

3

Tembusan Yth.:

- 1. Dewan Komisaris
- 2. Arsip.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN 2017



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PT JAMKRIDA JABAR

- I. PENDAHULUAN
- II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
 - 1. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite Audit dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal
 - c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal
 - d. Penerapan manajemen risiko, system pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi
 - e. Penerapan Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pegawai.
 - f. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Perusahaan
 - g. Rencana Strategis Perusahaan
 - 1) Rencana Jangka Panjang
 - 2) Rencana Kerja & Anggaran Tahunan
 - Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menjabat dan/atau pada badan usaha lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri yang Mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih
 - 3. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat

- a. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat
- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat
- c. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota DPS dimaksud menjabat

4. Pengungkapan hal penting lainnya

- a. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
- b. Transaksi material dengan pihak terkait
- c. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi
- d. Informasi material lain mengenai Perusahaan
- e. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen
- f. Sertifikasi
- g. Tenaga Kerja Asing
- h. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)
- i. Permasalahan Hukum
- j. Etika bisnis perusahaan
- III. PENILAIAN SECARA MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
- IV. RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)

I. PENDAHULUAN

Tata kelola merupakan faktor penting bagi Lembaga Penjamin dalam memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi, Karyawan, maupun pemangku kepentingan lainnya.

PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan. Untuk mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan. Perusahaan berusaha menjalankan seluruh nilai praktik GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, DPS, Direksi, dan seluruh karyawan merupakan modal utama untuk mewujudkan Perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.

Perusahaan percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat, baik bagi Perusahaan maupun para Pemangku Kepentingan, yaitu dengan :

- 1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Perusahaan.
- 2. Meningkatkan kinerja Perusahaan, efisiensi, manajemen dan pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
- 3. Melindungi Perusahaan dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum
- 4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Pemegang Saham dengan Perusahaan.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

- 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 - 1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.
 - a. Direksi

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit</i> and ProperTest	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga- negaraan	Domisili
1.	Tri Budhi Muljawan	Utama	Keputusan Dewan Komisioner OJK 15-09-2014 No.:KEP- 2333/NB.1/2014	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia	Indonesia
2.		Keuangan	15-09-2014 No.:KEP- 2334/NB.1/2014	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia	Indonesia
	- 71-	Direktur Operasional	10-03-2014 No.:KEP- 111/NB.1/2014	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia	Indonesia

1. Tri Budhi Muljawan

Diangkat sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar pada bulan Mei 2014. Beliau menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi negara (STAN) pada tahun 1999. Memulai pekerjaan profesionalnya sebagai Auditor Pajak di Direktorat Jenderal Pajak dari mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Melanjutkan karirnya sebagai Spv. *Tax & Treasury* di PT Patra Nusa Data (2000-2002), Tim Inti Implementasi SAP di PT Elnusa Kemudian beliau melanjutkan karirnya di *Bosowa Group* dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Jabatan terakhir yang diembannya adalah sebagai CFO & kadiv. *Strategic Planning* dan Direktur Keuangan di PT Bosowa Sekuritas.

2. Budi Setyono

Diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar pada tahun 2014. Beliau menyelesaikan Pendidikan Magister di Universitas Pasundan pada tahun 2016, setelah sebelumnya meraih gelar Akuntan di STAN tahun 1997. Beliau pernah menjadi Direktur Keuangan dan Umum PT Agronesia (2012-2014), CFO *Transportation Group* di *Bosowa Corporation* (2011-20120 GM *Finance & Accounting* di *Group Automotives Bosowa Corporation* (2009-2011), *Budget Controller* di PT Jawamanis di PDAM Pati-Jawa Tengah (2007), Manager keuangan & Administrasi di Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (2004), *Team Leader* auditor di (BPKP) tahun 1999.

3. Asep Gunawan Sirad

Diangkat sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar pada tanggal 23 November 2012. Lulus dari Universitas Langlangbuana Bandung. Memulai karirnya pada tahun 1996 di PT Sarana Lindung Upaya sebagai Staf Pemasaran. Pada tahun 2006, diangkat menjadi Kepala Seksi Pemasaran di perusahaan yang sama. Karirnya terus meningkat di PT Sarana Lindung Upaya sampai akhirnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Barat merangkap sebagai Kepala Cabang bandung di tahun 2011. Pada tahun 2012, sempat menjabat sebagai Koordinator Satuan Tugas Khusus Pemasaran Langsung *Non Captive* Wilayah jawa Barat, Renbang (Pj. Kepala Divisi IT Kantor Pusat), Pj. Kepala Divisi SPI Kantor Pusat dan kepala cabang Jakarta Penugasan Khusus.

Selama tahun 2017 tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi.

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit</i> and ProperTest	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga- negaraan	Domisili
1.	. Rodhiallah Komisaris Utama		Keputusan Dewan Komisioner OJK 10-03-2014 No.:KEP- 107/NB.1/2014	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia	Indonesia
	2. Syafrial Anggota Firdaus Komisaris		Keputusan Dewan Komisioner OJK 25-09-2015 No.:KEP- 619/NB.11/2015	Akta No 01 Tanggal 31 Januari 2017 Masa Jabatan 4 (empat) tahun (31-01-2017 s.d. 31-12-2020)	Indonesia	Indonesia

1. Rodhiallah

Diangkat sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar pada tanggal 23 November 2012. Lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1987. Memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 20 tahun sebagai auditor internal pemerintah (Perwakilan BPKP) termasuk Inspektorat Kementerian BUMN sampai dengan tahun 2011 sebelum beralih masuk ke jajaran manajemen di sektor swasta.

2. Syafrial Firdaus

Diangkat sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar pada tanggal 30 April 2015. Menyelesaikan studi di STAN pada tahun 1987, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di STIE-IPWI dan STIE-YAI. Sebelum menjabat sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar, beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, membangun dan memantau Manajemen Risiko pada PT Asuransi Takaful Umum.

Selama tahun 2017 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit</i> and <i>ProperTest</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Kewarga- negaraan	Domisili
1.	Zaini Abdul Malik	Ketua DPS	Keputusan Dewan Komisioner OJK 16-03-2015 No.:KEP- 488/NB.1/2015	Akta No. 38 Tanggal 28 November 2014	Indonesia	Indonesia
2.	Khozin Abu Faqih		Keputusan Dewan Komisioner OJK 16-03-2015 No.:KEP- 489/NB.1/2015	Akta No. 38 Tanggal 28 November 2014	Indonesia	Indonesia

1. Zaini Abdul Malik

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada bulan April 2015. Lulus dari IAIN SGD Bandung tahun 1999, kemudian beliau meneruskan pendidikannya di Sekolah Pascasarjana UIN Syahid Jakarta tahun 2008. Beliau merupakan Dosen Fakultas Syari'ah di UNISBA. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Forum Ekonomi Syari'ah Jakarta (Fajar Esya) pada tahun 2002-2003, dan beliau terdaftar sebagai Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PW. Muhammadiyah Jawa Barat Periode 2010-2015. Beliau juga menyusun karya-karya ilmiah Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah.

2. Khozin Abu Faqih

Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Jamkrida Jabar pada bulan April 2015. Lulus dari LIPIA (Univ. Imam Ibnu Saud, Riyadh) cabang Jakarta, pada tahun 1996. Adapun riwayat karir profesionalnya adalah sebagai Dosen Ma'had Shalahuddin Bogor (1994-1996), Dosen Ma'had Al-Imarat Bandung (2000-2009), Pengisi Kajian Wawasan Islam MQFM (2010-2012), Pengasuh Pesantren Inovatif Al-Ibda' dan pesantren Al-Ilham (SMK Perbankan Syariah) (2013-sekarang). Beliau juga dikenal sebagai penulis dan penerjemah buku-buku Islam.

Selama tahun 2017 tidak terdapat perubahan susunan DPS.

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi untuk kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
 - b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
- 2. Direksi bertanggungjawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

- 3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- 4. Dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus menginformasikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu :
 - a) Setiap perubahan penyertaan saham Perseroan pada perusahaan lain baik berupa pengalihan saham, pengurangan saham, maupun peningkatan saham. Direksi harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris. Atau apabila Komisaris Utama berhalangan, maka untuk tindakan tersebut Direksi harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Perseroan.
 - b) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - c) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan di atas, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

- 5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 6. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

b. Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah:

- 1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- 3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
- 4. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara tertulis.
- 5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
- 6. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
- 7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberi nasihat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula :

- 1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, *culture* dan *value* dari Perseroan.
- 2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang perlu diterapkan oleh Perseroan.
- 3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat sistem pengelolaan sumber daya manusia.
- 4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian resiko.
- 5. Melakukan penilaian dan memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya di dalam RKAP Tahunan.
- 6. Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan bisnis strategis yang menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 7. Memberikan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas halhal yang perlu ditindaklanjuti.
- 8. Memberikan persetujuan atas RKAP yang diajukan oleh Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan dan pembicaraan dengan Direksi.
- Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris agar secara khusus melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu, yang dituangkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris maupun dalam hasil keputusan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris.

c. DPS

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah

- Dewan Pengawas Syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah milik Perseroan, serta sebagai wakil Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- 2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap :
 - a) Kegiatan Penjaminan Syariah;
 - b) Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan
 - c) Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan
- 3. Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi rnengenai Unit Usaha Syariah milik Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.
- 4. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.
- Rangkap Jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS
 Tidak terdapat rangkap jabatan, baik untuk Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS.
- Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

a. Direksi

No	Nama	<i>Workshop/training/</i> seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Tri Budhi Muljawan	Seminar Internasional OJK: Changing Consumer Behavior Through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer ProtectionConsumer Behavior Through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection	Mei	ОЈК
2.	Tri Budhi Muljawan,	Workshop Current Issues In Interprise Risk Management	Mei	PT RAP
3.	Asep Gunawan Sirad	Workshop Current Issues In Interprise Risk Management	Mei	PT RAP
4.	Budi Setyono	Workshop Forensic Accounting Vs Investigative Audit	September	Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Yogyakarta
5.	Budi Setyono	Workshop IAI: PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73	Desember	Ikatan Akuntansi Indonesia

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
		Program Sertifikasi CRGP + Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko	November	PT RAP Asia Consulting

c. DPS

No	Nama	Workshop/training seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Khozin Abu Faqih	Workshop Annual Meeting DPS	Oktober	Dewan Syariah Nasional MUI
2.	Zaini Abdul Malik	Workshop Annual Meeting DPS	Oktober	Dewan Syariah Nasional MUI

5.	Pelaksanaan	kegiatan d	lan rek	omendasi	i Dewan	Komisaris	dan Di	PS
----	-------------	------------	---------	----------	---------	-----------	--------	----

Belum ada	

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

Komisaris Independen belum terbentuk

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

a. Rapat Direksi

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 17 bahwa "Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan".

Selama tahun 2017, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

		Juml	ah Kehadiran	
No.	Nama	Fisik	Sarana Media Elektronik	% Kehadiran
1.	Tri Budhi Muljawan	11	-	100 %
2.	Budi Setyono	11	<u> </u>	100 %
3.	Asep Gunawan Sirad	8	-	73 %

b. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 31 bahwa "Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan".

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

			Jumla	ah Kehadiran	
	No.	Nama	Fisik	Sarana Media Elektronik	% Kehadiran
1	1.	Rodhiallah	9	-	100 %
	2.	Syafrial Firdaus	9	-	100 %

c. Rapat DPS

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 40 bahwa "DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun".

Selama tahun 2017 telah diselenggarakan rapat DPS sebanyak 1 (satu) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

		Jur		
No.	Nama	Fisik	Sarana Media Elektronik	% Kehadiran
1.	Zaini Abdul Malik	1	-	100 %
2.	Khozin Abu Faqih	1	-	100 %

- 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:
 - 1) komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
 - 2) fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten,

dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas :

1.	Struktur,	keanggotaan,	dan	keahlian	komite	audit/fungsi	yang	memb	antu
	Dewan K	omisaris						/	

Komite Audit belum terbentuk

2. Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Komite Audit belum terbentuk

3. Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Komite/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite audit/ membantu Dewan Jumlah Kehadiran	
1.	-	-	-
2.	-	-	-

4. Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

Komite Audit belum terbentuk

5. Struktur komite lainnya

belum terbentuk

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

belum terbentuk

- 3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal
 - 1. Fungsi kepatuhan
 - a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Direktur Utama

b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal

c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Sekretaris Perusahaan:

Tujuan Jabatan :

Melakukan penegakan kepatuhan terhadap regulasi otoritas industri serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Compliance Officer*).

Tugas dan Kewenangan:

- Mempublikasikan informasi terkini tentang Perseroan dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik
- 2. Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi rapat pemegang saham dan rapat dewan
- 3. Menyelenggarakaan Rapat Manajamen, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus) dan Rapat Umum Pemegang Saham
- 4. Mengikuti perkembangan core business perseroan, terutama perubahan pada hukum dan peraturan
- Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada ketentuan regulasi yang berlaku.

Satuan Pengawasan Internal

Tujuan Jabatan :

Membantu Direksi merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan kegiatan audit operasional dan keuangan serta kegiatan penyusunan SOP di Perusahaan dalam batasan standar perusahaan dan peraturan pemerintah yang berlaku dengan sasaran untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan/atau peraturan yang ada.

Tugas dan Kewenangan:

- 1. Merancang, mengusulkan, mengimplementasi serta mengevaluasi rencana program/kebijakan Satuan Pengawas Internal dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan
- 2. Merencanakan dan membuat program audit, menjadualkan implementasi audit dalam rangka memastikan kesesuaian dengan peraturan/prosedur/efisiensi/fungsi kontrol manajemen yang diharapkan
- 3. Mengawasi dan memantau kegiatan operasional, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan kesesuaian dengan prosedur dan meningkatkan efisiensi
- 4. Mengawasi dan memantau kegiatan keuangan, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa distribusi kas dan penggunaannya sesuai dengan prosedur serta efisien.
- Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait dalam melakukan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP); mengelola dan memonitor pelaksanaannya dalam rangka memastikan keberadaan dan kesesuaian pelaksanaannya
- 6. Melakukan control & monitoring atas pelaksanaan audit program serta melaporkan hasil temuan audit kepada manajemen dengan disertai rekomendasi perbaikannya.
- 7. Merumuskan, menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta SOP divisi SPI
- 8. Melaksanakan dan mengawasi penerapan *Good Corporate Governance* di bidang tugasnya.

d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

Perusahaan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang memadai, dengan parameter rasio likuiditas, *gearing ratio*, rasio rentabilitas dan penilaian sendiri (*selt assessment*) tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam tabel dibawah ini :

ulliyat	akan dalam tabel dibawah ini :				
No.	Jenis Rasio	Tahun 2017			
1.	LIKUIDITAS				
a.	Current Ratio	1.202,79 %			
b.	Acid Test Ratio	932,10 %			
C.	Cash Ratio	911,50 %			
2.	GEARING RATIO				
a.	Gearing Ratio Produktif	5,92 x			
b.	Total Gearing Ratio	12,82 x			
3.	RENTABILITAS				
a.	Return on Asset (ROA)				
b.	Return on Equity (ROE) 2,57				
C.	Net Profit Margin *) 14,84				
d.	BOPO 51,66 %				
*) Net	<i>Profit Margin</i> : perbandingan antara Laba Setelah Pa Pendapatan Penjaminan	ajak dengan Jumlah			
4.	Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) tata kelola perusahaan yang baik.				
	Hasil Penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) tata kelola perusahaan yang baik PT Jamkrida Jabar mendapatkan nilai 77 (tujuh puluh tujuh) dengan predikat " Baik ", sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin.				

e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1.	Catur Priyo Widodo	Kadiv. Manrisk & Klaim
2.	Pamungkas Hendro H.	Sekretaris Perusahaan
3.	Irwan Budhi S.	Kepala UUS

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Jamkrida Jabar Nomor KEPT-0006/DIRUT/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, tentang Penugasan Pejabat Pelayanan Pengaduan.

2. Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

- a. Ruang lingkup pekerjaan audit
 - Memeriksa dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, menjamin kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional serta menjaga dan melindungi aset Perusahaan;
 - Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan, serta ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
 - 3. Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*).
 - 4. Melaksanakan audit kinerja atas perencanaan dan program kerja masing- masing unit kerja dan penilaian kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan serta penilaian terhadap manajemen risiko.
 - 5. Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas SPI.
 - 6. Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya SPI

- b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal
 - 1. Satuan Pengawasan Internal (SPI) berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.
 - 2. Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal (Ka. SPI).
 - 3. Kepala Satuan Pengawasan Internal (Ka. SPI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

c. Independensi auditor internal

- Satuan Pengawasan Internal (SPI) secara organisasi dan pribadi harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit sehingga dapat memberikan pendapat dan rekomendasi yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Independen dapat dicapai melalui kedudukan dalam perusahaan dan obyektivitas auditor yaitu:
- Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus ditempatkan pada posisi langsung di bawah Direktur Utama sehingga pelaksanaan audit internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan unit kerja perusahaan, tanpa campur tangan pihak manapun;
- 2. Satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi dan pelaporan unit kerja perusahaan untuk memastikan kredibilitas hasil pengawasannya.
- 3. Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, serta dalam pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berwenang.
- 4. Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilarang mempunyai rasa ketakutan, loyalitas, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.

- Satuan Pengawasan Internal (SPI) dikatakan bertindak obyektif bila bersikap independen dan tidak bias, serta menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
 - 1. Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus memiliki sikap mental yang obyektif, independen dan menghindari kemungkinan benturan kepentingan dalam melakukan tugas pengawasan.
 - 2. Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus yakin dapat mengambil keputusan profesionalnya secara bebas, hasil kerjanya handal, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat dipakai semua pihak terkait
- Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus menjaga integritas melalui:
 - 1. Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pegawai, klien ataupun mitra perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
 - 2. Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus menunjukkan sikap mental yang jujur dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
 - 3. Satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat merusak citra.
- d. Uraian tugas satuan kerja audit internal
 Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :
 - Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung-jawab pengelolaan perseroan, dengan cara audit atas ketaatan, operasional, dan kinerja seluruh kegiatan unit kerja perusahaan secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saran-saran perbaikan mengarah pada pencapaian tujuan dan

- sasaran yang telah ditetapkan pada masing- masing unit kerja dan perusahaan.
- 2. Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya *Good Corporate Governance*, mendorong efektivitas system pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis;
- 3. Membantu Direksi untuk memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan;
- 4. Mendorong unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Perusahaan;
- 5. Memberikan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan pengelolaan risiko atas kegiatan perusahaan;
- 6. Melaporkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kelemahan dan peluang perbaikan proses pengendalian keuangan dan operasional kegiatan perusahaan;
- 7. Mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan perencanaan audit;
- 8. Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit semester, tahunan, dan audit lanjutan (audit khusus) serta kecukupan sumber daya audit;
- 9. Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis dan pengendalian internal perusahaan;
- 10. Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit (LHA).

e. Profil kepala satuan kerja audit internal

Diangkat sebagai Satuan Pengawasan Internal PT Jamkrida Jabar pada tanggal 1 Juli 2016. Lulus dari Universitas Langlangbuana Bandung. Memulai karirnya pada tahun 1989 di Perusda Kerta Karkim sebagai Staf Akuntansi & Keuangan. Pada tahun 1996, diangkat menjadi Kepala Seksi Keuangan di Perusahaan Daerah Industri. Tahun 2004 menduduki posisi Internal Audit di PT. Agronesia, Tahun 2010, sebagai Manager Keuangan, Tahun 2012 sebagai Manager Corporate Planning, tahun 2014 menjadi Manager Existing Business dan tahun 2015 sebagai Manager Akuntansi & Keuangan pada perusahaan yang sama.

f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

Jumlah pegawai yang berada dibawah Divisi Satuan Pengawasan

Internal (SPI) PT Jamkrida Jabar saat ini, hanya 1 (satu) orang.

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Untuk periode 2017 belum ada laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal, dikarenakan

3. Fungsi auditor eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Pada saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif.

Direksi mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, perkembangan peraturan OJK dan lain-lain.

Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang dimasa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK.
- b. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah.
- c. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- d. Penugasan pemeriksaan kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek :
 - Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
 - Legalitas perjanjian kerja;
 - Ruang lingkup audit;
 - Standar profesional akuntan publik; dan
 - Komunikasi antara OJK dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- e. Akuntan Publik yang ditunjuk telah:
 - Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perseroan tepat waktu.
 - Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2017	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Supandi	Rp 99.000.000,00
2016	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Husni	Rp 99.000.000,00
2015	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Husni	Rp 99.000.000,00
2014	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Husni	Rp 99.000.000,00
2013	Husni, Mucharam & Rasidi (HMR)	Husni	Rp 99.000.000,00

- 4. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi
 - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - Direksi bertanggungjawab terhadap penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan tata kelola teknologi informasi serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.
 - Dewan Komisaris, mengawasi tingkat efektifitas dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penggunaan teknologi informasi, mengharuskan perseroan patuh terhadap ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Kebijakan ini menetapkan prinsip dan proses manajemen risiko yang dilaksanakan dengan tahapan : identifikasi risiko, peniliaian risiko, penanganan risiko dan monitoring serta evaluasi

d. Struktur organisasi sistem informasi

Organisasi Pengelolaan SIM PT Jamkrida Jabar terdiri atas:

- 1. Pengelola data (admin).
- 2. PIC User (setiap divisi).
- e. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi mengacu kepada SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Pedoman *Disaster Recovery Plan* Perseroan

f. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Kepatuhan terhadap kebijakan dan panduan risiko secara regular dipantau oleh unit kerja yang bersangkutan.

- 5. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai
 - 1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

Pemberian tunjangan komunikasi, tunjangan bahan bakar minyak, tantiem, tunjangan cuti dan tunjangan purna jabatan

 Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

Pemberian tunjangan asuransi kesehatan

- 2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
 - a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi,
 Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

Pemberian tunjangan komunikasi, tunjangan bahan bakar minyak, tantiem, tunjangan cuti dan tunjangan purna jabatan

b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

3 orang Direksi, 2 orang Dewan Komisaris, dan 2 orang Dewan Pengawas Syariah

			Fasilitas lain
Jumlah yang	ı diterima dalam satu tahun	Remunerasi*)	dalam bentuk
			natura **)
Direksi	Jumlah Direksi	3	3
Direksi	Nominal (Jutaan Rupiah)	3.558,1	22,1
Dewan Jumlah Dewan Komisaris		2	2
Komisaris	Nominal (Jutaan Rupiah)	692,2	14,5
DPS	Jumlah DPS	2	2
ביוט	Nominal (Jutaan Rupiah)	117,3	13,8

Keterangan:

- *) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura
- **) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.
- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang	Jumlah	Jumlah	Jumlah
dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Direksi	Komisaris	DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua	0	0	0
miliar rupiah)	· ·	· ·	
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu			
miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00	3	0	0
(dua miliar rupiah)			
Di atas Rp500.000.000,00 (lima			
ratus juta rupiah) s.d	0	0	0
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)			
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	0	2	2
kebawah	J		_

Jumlah yang tercantum diambil dari total THP Bruto per tahun buku 2017

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Rasio gaji
1) 7:1
2) 1,15:1
3) 1,15:1
4) 2,5:1

6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan mengenai Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
- 2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dipublikasikan melalui website www.jamkrida-jabar.co.id
- 3. Informasi mengenai produk-produk jasa penjaminan yang diterbitkan oleh perseroan tersedia pada website.

7. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

1. Rencana jangka panjang dan rencana kerja

- a. Volume Kredit Perseroan diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 10% setiap tahunnya dengan *market share* rata-rata sebesar 2%.
- b. Dengan coverage penjaminan maksimal 70% untuk kredit produktif dan 100% untuk kredit non produktif, maka volume penjaminan diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 10% setiap tahunnya. Adanya penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat lebih meningkatkan persentase peningkatan volume penjaminan setiap tahunnya.
- c. Proyeksi pertumbuhan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) *Cash Basis* rata-rata sebesar 10%.
- d. Memperluas kerjasama mitra bisnis dengan konsep bisnis berbasis resiprokal dan tetap mengedapankan faktor *profitable* dan *prudential*.
- e. Mengurangi dampak dari *potential claim* penjaminan kredit produktif dengan meningkatkan potensi pendapatan investasi.
- f. Laba (Rugi) Perseroan diproyeksikan mengalami penurunan di tahun 2018 dikarenakan adanya proyeksi peningkatan beban klaim yang cukup signifikan. Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya Laba (Rugi) Perseroan diproyeksikan terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 30% dari tahun sebelumnya.

2. Anggaran tahunan

- a. Volume penjaminan tahun 2018 ditetapkan sebesar 5.209,55 Miliar Rupiah atau tumbuh secara signifikan, yakni sekitar 67% lebih tinggi dari angka prognosa 2017.
- b. Pendapatan Investasi mengalami peningkatan sebesar 5,87% dari sebesar Rp 10,89 Miliar dalam prognosa 2017 menjadi sebesar Rp 11,53 Miliar.
- c. Jumlah pendapatan non operasional dalam RKAP 2018 mengalami kenaikan sebesar 88,39% atau Rp 1,511 Miliar jika dibandingkan dengan prognosa tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 802,48 Juta.
- d. Beban Akuisisi (*fee agency*) meningkat dari Rp 3,6 Miliar menjadi Rp 4,39 Miliar mengalami kenaikan sebesar 21,94%, sedangkan beban regaransi meningkat 30,38% dari Rp 9,86 Miliar dalam Prognosa 2017 menjadi Rp 12,86 Miliar dalam RKAP 2018.
- e. Beban klaim menjadi Rp 16 Miliar atau mengalami kenaikan sebesar 13,43% dari Rp 14,7 Miliar.
- f. Biaya operasional mengalami kenaikan sebesar 30,07% dari prognosa 2017 sebesar Rp 1,23 Miliar menjadi sebesar Rp 1,61 Miliar.
- g. Beban SDM mengalami kenaikan sebesar 22,69% dari prognosa 2017 sebesar Rp 9,74 Miliar menjadi Rp 11,95 Miliar.
- h. Beban administrasi dan umum mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 21,47% dari prognosa sebesar Rp 3,13 Miliar menjadi sebesar Rp 3,8 Miliar.
- Anggaran belanja modal dalam RKAP 2018 secara total mencapai Rp 2,393 Miliar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu anggaran belanja untuk konvensional sebesar Rp 2,128 Miliar dan unit usaha syariah mencapai Rp 265 Juta.

8. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Tidak Ada	А	Nihil	Nihil
		В	Nihil	Nihil
		С	Nihil	Nihil
		D	Nihil	Nihil

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

- 9. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat
 - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

		Hubungan	E	Bentuk I	Hubur	ngan	
No.	Nama	dengan	Keu	angan	Ke	luarga	Keterangan
		acrigari	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Tri Budhi	Direksi		√		√	
	Muljawan	lainnya			·		
		Dewan				\checkmark	
		Komisaris					
		DPS		√		√	
		Pemegang		√		√	
		saham					
2.	Budi Setyono	Direksi		√		√	
		lainnya					
		Dewan		√		√	
		Komisaris					
		DPS		√		√	
		Pemegang		√		√	
		saham					
3.	Asep Gunawan	Direksi		√		\checkmark	
	Sirad	lainnya					
		Dewan		√		√	
		Komisaris					
		DPS		√		√	
		Pemegang		√		√	
		saham					

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

				entuk Hu	gan	Keterangan	
No.	Nama	Hubungan dengan	Keu	angan	Kel	luarga	Reterangun
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Rodhiallah	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris lainnya		√		√	
		DPS		√		\checkmark	
		Pemegang saham		√		√	
	Syafrial	Direksi		√		√	
	Firdaus	Dewan Komisaris lainnya		V		√	
		DPS		√ •		√	
		Pemegang saham		√		√	

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

		Hubungan	Bentuk Hubungan				
No.	Nama		Keua	angan	Kel	uarga	Keterangan
		dengan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Zaini Abdul	Direksi		√		√	
	Malik	Dewan Komisaris		√		√	
		DPS lainnya		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
2.	Khozin Abu	Direksi		√		√	
	Faqih	Dewan Komisaris		√		√	
		DPS lainnya		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

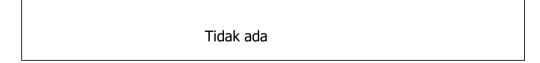
Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/ tiri/angkat dari orang tua beserta besan, suami/istri suami atau istrinya, mertua, dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

10. Pengungkapan hal penting lainnya:

1.	Pengunduran	diri ata	au pemb	perhentian	auditor e	eksternal

	Tidak ada
--	-----------

2. Transaksi material dengan pihak terkait



3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset Lembaga Penjamin oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Lembaga Penjamin.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-		_

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

Selama tahun 2017, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Tidak ada

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Tidak ada

6. Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.	Tri Budhi Muljawan	Kuala Lumpur,09 s/d 10 Mei 2017	LSPMR
2.	Asep Gunawan Sirad	Kuala Lumpur,09 s/d 10 Mei 2017	LSPMR
3.	Syafrial Firdaus	Yogyakarta 21 s/d 24 November 2017	LSPMR

7. Tenaga kerja asing

Selama tahun 2017, tidak menggunakan tenaga kerja asing

			Nomor	K1	ITAS	I	MTA
No.	Nama	Jabatan	Fit and Proper Test	Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)

Selama tahun 2017, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap

	Jumlah kasus yang dilakukan oleh						
Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap				
Total penyimpangan	-	-	-				
Telah diselesaikan	-	-	-				
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-				
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-				
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-				

9. Permasalahan hukum

Selama tahun 2017, tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

Downsonlehan Huluwa	Jumlah Kasus			
Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana		
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap a. b.	Nihil	Nihil		
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata	Niḥil	Nihil		
b.	1			
Total	Nihil	Nihil		

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Etika bisnis yang dijadikan acuan bagi Perseroan dan seluruh karyawan termuat dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Jamkrida Jabar

Menyetujui,

DIREKSI

Ttd.

<u>Tri Budhi Muljawan</u> Direktur Utama

III. PENILAIAN SECARA MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Untuk periode Tahun 2017 PT Jamkrida Jabar telah melakukan penilaian secara mandiri (*Self Assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan hasil penilaian sebagai berikut :

1. Penjaminan Konvensional

 Ketentuan Penilaian

 Nila
 Rangking
 Predikat

 84-100
 1
 Sangat Baik

 68-83
 2
 Baik

 52-67
 3
 Cukup Baik

 36-51
 4
 Kurang Baik

 20-35
 5
 Tidak Baik

Hasil Penilaian						
Faktor	Sheet	Nilai				
1	A	25.88				
2	B1	1.00				
	B2	1.60				
3	С	6.83				
4	D	5.33				
5	E	2.14				
6	F	15.00				
7	G	7.50				
8	H	1.00				
9	Ī	1.00				
10	J	9.75				
	Total Nilai	77.04				
	Predikat	Baik				



2. Unit Usaha Syariah

Ketentuan Penilaian Nilai Rangking Predikat 84-100 Sangat Baik 68-83 Baik 52-67 3 Cukup Baik 36-51 Kurang Baik 20-35 5 Tidak Baik

	nasii Feiliaiaii						
Faktor	Format	Nilai					
1	A	30.16					
2	B1	1.00					
_	B2	1.00					
3	С	7.17					
4	D	8.40					
5	E	1.68					
6	F	12.50					
7	G	7.50					
8	H	0.50					
9	I	1.00					
10	J	6.30					
	Total Nilai	77.21					
	Predikat	Baik					

Hasil Penilaian



Berdasarkan tabel Hasil Penilaian diatas, dapat disimpulkan bahwa PT Jamkrida Jabar dengan raihan nilai 77,04 (tujuh puluh tujuh koma kosong empat) untuk Penjaminan Konvensional dan 77,21 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh satu) untuk Unit Usaha Syariah, telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan predikat "Baik".

IV. RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)

No.	Tindakan korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	keterangan
1.	Mengisi posisi	Selambat-	a. Belum tersedianya	
	Komisaris	lambatnya	SEOJK yang	
	Independen	Januari 2019	mengatur mengenai	
			Komisaris	
			Independen	
			Lembaga Penjamin	
			b. Belum adanya	
			keputusan RUPS	
			terkait dengan	
			Komisaris	
			Independen	
2.	Pembentukan	Selambat-	Belum terisinya posisi	
	Komite Audit	lambatnya	Komisaris Independen	
		Januari 2019		
3.	Pengangkatan	Selambat-	Belum terbentuknya	Tenaga ahli bidang
	Anggota Komite	lambatnya	Komite Audit	keuangan/hukum
	Audit	Januari 2019		diluar struktur SDM
				Perseroan
4.	Penyusunan Jadwal	TW II Tahun	Penyesuaian waktu	Termasuk
	Rapat Direksi,	2018	dengan yang	diantaranya
	Dewan Komisaris,		bersangkutan	undangan rapat,
	dan Dewan			agenda rapat dan
	Pengawas Syariah			notulensi.

Menyetujui,
Direksi Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah

Ttd. Ttd. Ttd.

Tri Budhi Muljawan
Direktur Utama Rodhiallah
Komisaris Utama Ketua

38

LAMPIRAN

KERTAS KERJA PENILAIAN SECARA MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PENJAMINAN KONVENSIONAL



LAMPIRAN II SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /SEOJK.05/2017

TENTANG LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN



Penilaian secara mandiri (self assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang

Pengantar:

- 1. Sesuai dengan SE OJK No. XX/SEOJK.05/2017, kuesioner ini merupakan salah satu ketentuan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
- 2. Kuesioner ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin yaitu Perusahaan Penjaminan yang tidak memiliki unit usaha syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang.
- 3. Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Petunjuk Pengisian:

- 1. Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
- Berilah tanda silang (X) pada kolom 1 Sangat Sesuai, 2 Sesuai, 3 Cukup Sesuai, 4 Kurang Sesuai dan 5 Tidak Sesuai atau pada kolom Ya dan Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 3. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan di masing-masing faktor yang ada.
- 4. Kuesioner ini terdiri dari 10 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/pernyataan terkait penilaian atas faktor tersebut.
- 5. Format A sampai dengan Format J merupakan pengisian untuk masing-masing dari 10 faktor sesuai dengan ketentuan, dan Format K merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (self assessment).
- 6. Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati, dan sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin sebenarnya.

Rincian Nilai Bobot Indikator

No	Faktor	Bobot (%)	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.	30.00	Lihat "Format A"
2	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas: a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	5.00	Lihat "Format B1" atau "Format B2" (isi salah satu sesuai ketentuan)
3	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7.50	Lihat "Format C"
4	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi.	10.00	Lihat "Format D"
5	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2.50	Lihat "Format E"

6	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga	15.00	Lihat "Format F"
	Penjamin.	13.00	Lillat Format F
7	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran	7.50	Lihat "Format G"
	tahunan.	7.00	Emat Tormat G
8	Pengungkapan kepemilikan saham.	5.00	Lihat "Format H"
9	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga		
	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota		
	Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau	5.00	Lihat "Format I"
	pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi		
	dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		
10	Pengungkapan hal-hal penting lainnya.	12.50	Lihat "Format J"
	JUMLAH	100.00	



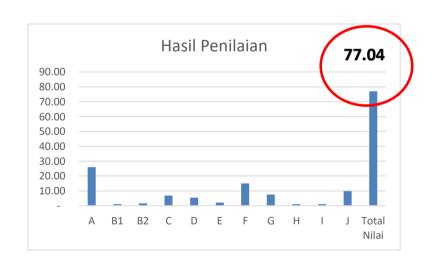
Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Sheet	Nilai
1	A	25.88
2	B1	1.00
2	B2	1.60
3	С	6.83
4	D	5.33
5	E	2.14
6	F	15.00
7	G	7.50
8	Н	1.00
9	I	1.00
10	J	9.75
	Total Nilai	77.04
	Predikat	Baik





		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. D	ireksi		1	1		1			1
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan	x							5
	sebagai Direksi.								
	Direksi mampu bertindak dengan								
2	itikad baik, jujur dan profesional.	x							5
	Direksi bertindak untuk								
3	kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.	x							5
	Direksi mendahulukan								
4	kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan	x							5
	pribadi. Direksi mampu mengambil								
5	keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.	х							5
	Direksi mampu menghindarkan								
	penyalahgunaan kewenangan								
	untuk mendapatkan keuntungan								
6	pribadi yang tidak semestinya	x							5
	atau menyebabkan kerugian bagi								
	Lembaga Penjamin.								
7	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.	x							5
	Direksi mematuhi peraturan								
	perundang-undangan, anggaran								1
8	dasar, dan peraturan internal lain	x							5
	dari Lembaga Penjamin dalam								
	melaksanakan tugasnya. Direksi mengelola Lembaga								-
9	Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung	x							5
	jawabnya. Direksi mampu								
10	mempertanggungjawabkan	x							5
	pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.	-							
	Direksi telah memastikan agar								
11	Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau	x							5
	penerima jaminan. Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan								
12	lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan		х						4
	Komisaris.		<u> </u>	1	1	1			L



				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Direksi mampu menghindarkan	Sesuai		Sesuai	Sesuai	Sesuai			
	transaksi yang mempunyai								
10	benturan kepentingan dengan								_
13	kegiatan Lembaga Penjamin	х							5
	tempat anggota Direksi dimaksud								
	menjabat.								
	Direksi mampu untuk tidak								
	memanfaatkan jabatannya pada								
	Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud								
1.4	menjabat untuk kepentingan	_							-
14	pribadi, keluarga, dan/atau pihak	Х							5
	lain yang dapat merugikan atau								
	mengurangi keuntungan Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Direksi								
	dimaksud menjabat.								
	Direksi mampu untuk								
	menghindari perbuatan								
	mengambil dan/atau menerima								
	keuntungan pribadi dari Lembaga								
15	Penjamin tempat anggota Direksi	X							5
	dimaksud menjabat selain								
	remunerasi dan fasilitas yang								
	ditetapkan berdasarkan								
	keputusan RUPS. Direksi mampu untuk menolak								
	permintaan pemegang saham								
	yang terkait dengan kegiatan								
16									3
10	tempat anggota Direksi dimaksud			Х					3
	menjabat selain yang telah								
	ditetapkan dalam RUPS.								
	Hasil rapat Direksi secara rutin						1		
17	telah dituangkan dalam risalah	x							5
	rapat Direksi.								
	Risalah rapat yang merupakan								
18	keputusan bersama seluruh								4
10	anggota Direksi telah		х						4
	didokumentasikan dengan baik.								
	Keputusan Direksi telah								
	dituangkan ke dalam risalah								
19	rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions)			X					3
	yang terjadi secara jelas.								
	Anggota Direksi Lembaga		I		1	I			
20							x		5
	Penjamin berdomisili di Indonesia.								
	Lembaga Penjamin yang						1		
	didalamnya terdapat kepemilikan						1		
	asing baik secara langsung						1		
21	maupun tidak langsung memiliki						1	x	1
	paling sedikit 50% (lima puluh						1		
	per seratus) anggota Direksi yang								
	merupakan warga negara Indonesia.								
	Direksi berkewarganegaraan asing								
20							1		1
22	memiliki surat izin menetap dari							x	1
	instansi yang berwenang.							l	



		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Direksi berkewarganegaraan asing								
23	memiliki surat izin bekerja dari							x	1
	instasi berwenang.								
24	Direksi Lembaga Penjamin							x	1
	memiliki komite investasi. Anggota Direksi Lembaga								
25	Penjamin tidak merangkap						x		5
20	jabatan pada Lembaga Penjamin								
	atau badan usaha lain.								
	Anggota Direksi tidak berasal dari								
26	pegawai atau pejabat aktif						x		5
	Otoritas Jasa Keuangan.								
	Direksi Lembaga Penjamin								
27	menyelenggarakan rapat Direksi						x		5
	secara berkala paling sedikit 1								
	(satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Direksi Lembaga Penjamin								
	= -								
	menghadiri rapat Direksi paling								
28	sedikit 50% (lima puluh per						x		5
	seratus) dari jumlah rapat Direksi								
	dalam periode 1 (satu) tahun.								
	Jumlah rapat Direksi yang telah								
	diselenggarakan dan jumlah								
29	kehadiran masing-masing anggota								1
29	Direksi perusahaan harus dimuat							X	1
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								
2. De	ewan Komisaris		T	ı	Т	T			Г
	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan								
1	dan pemberian nasihat kepada	x							5
	Direksi.								
	Dewan Komisaris mampu								
2	mengawasi Direksi dalam								5
2	menjaga keseimbangan	X							5
	kepentingan semua pihak.								
	Dewan Komisaris mampu								
3	memantau efektivitas penerapan	x							5
	Tata Kelola Perusahaan yang Baik.								
	Dewan Komisaris mampu								
	memastikan bahwa Direksi telah								
	menindaklanjuti temuan audit								
	dan rekomendasi dari satuan								
4	kerja audit internal Lembaga	x							5
	Penjamin, auditor eksternal, hasil								
	pengawasan Otoritas Jasa								
	Keuangan dan/atau hasil								
	pengawasan otoritas lain.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak melakukan transaksi								
	yang mempunyai benturan								
5	kepentingan dengan kegiatan	x							5
	Lembaga Penjamin tempat	-							_
	anggota Dewan Komisaris								
	dimaksud menjabat.								
	иннимоци тенјаваг.		I		L	I			



		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat	2	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	14	Tiuan	
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak memanfaatkan								
	jabatannya pada Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
6	Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi,	x							5
0	keluarga, dan/atau pihak lain	Α.							3
	yang dapat merugikan atau								
	mengurangi keuntungan Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk menghindari perbuatan								
	mengambil dan/atau menerima								
	keuntungan pribadi dari Lembaga								
7	Penjamin tempat anggota Dewan	X							5
	Komisaris dimaksud menjabat,								
	selain remunerasi dan fasilitas								
	yang ditetapkan berdasarkan								
	keputusan RUPS.								
	Anggota Dewan Komisaris mampu								
	untuk tidak mencampuri kegiatan								
8	operasional Lembaga Penjamin	X							5
	yang menjadi tanggung jawab								
	Direksi. Hasil rapat Dewan Komisaris								
9	dituangkan dalam risalah rapat	x							5
	Dewan Komisaris.								-
	Risalah rapat yang merupakan								
10	keputusan bersama seluruh	X							5
	anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.								
	Keputusan Dewan Komisaris telah								
	dituangkan ke dalam risalah								
11	rapat, termasuk perbedaan		x						4
	pendapat (dissenting opinion)								
	yang terjadi secara jelas.								
	Dewan Komisaris mampu								
	menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan								
12	cepat serta dapat bertindak	X							5
	secara independen dalam								
	melaksanakan tugas.			L	L	L			
13	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang						x		5
10	anggota Dewan Komisaris.						_ ^		
	Lembaga Penjamin memiliki								
14	paling sedikit 1 (satu) Dewan						x		5
	Komisaris yang berdomisili di Indonesia.								
	Anggota Dewan Komisaris yang								
	berkewarganegaraan asing								
15	memiliki surat izin bekerja dari							x	1
	instansi berwenang.								
	Anggota Dewan Komisaris yang								
	berkewarganegaraan asing								
16	memiliki surat izin menetap dari							x	1
	instansi berwenang.								
	mount of winarig.						L		L



		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Anggota Dewan Komisaris								
	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
17	rangkap jabatan sebagai anggota						x		5
17	Dewan Komisaris pada lebih dari						^		3
	3 (tiga) Lembaga Penjamin atau								
	badan usaha lain.								
	Anggota Dewan Komisaris tidak								
18	berasal dari pegawai atau pejabat						x		5
	aktif Otoritas Jasa Keuangan.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang								
19	merupakan bagian dari laporan						x		5
	penerapan Tata Kelola								
	Perusahaan yang Baik.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	Lembaga Penjamin								
20	menyelenggarakan rapat Dewan						x		5
	Komisaris paling sedikit 1 (satu)								
	kali dalam 3 (tiga) bulan.								
	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan								
	Komisaris paling sedikit 75%								
21	(tujuh puluh lima per seratus)						x		5
	dari jumlah rapat Dewan								-
	Komisaris dalam periode 1 (satu)								
	tahun.								
	Jumlah rapat Dewan Komisaris								
	yang telah diselenggarakan dan								
22	jumlah kehadiran masing-masing								5
22	anggota Dewan Komisaris dimuat						х		3
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								

Г	Nilai Faktor	25.88
L	Bobot	30.00
ı	Total Indikator	51
Γ	Jumlah Skor Indikator	220



B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

a. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama. Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah 2 Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lainy ang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin peraturan pernadang undangan di bidang penjaminan, penjaminan waktu 6 (enam bulan tersebut dalam kanun waktu 6 (enam bulan tersebut dalam kanun waktu 6 (enam bulan tersebut dalam kanun waktu 6 (enam bulan tersebut kalam kanun					Kriteria	/Indikator I	Penilaian			
Nomisaria Independent idalak mempunyai Indungan affiliasi dengan anaggata Direksi, anggata Demokni, Nomisaria, stata pempengng sahana fembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin anaggata Direksi, anggata Dir	No	Pernyataan/Pertanyaan	Sangat		3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
Institutional analysis dengan anagota Dicksii, anagota Demokrai, anagota Demokrai, bermerang sahan Komisaris, status permejanga sahan Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Nenjamin yang sama. Komisaris Independent tidak permah menjadi sama dana banda sama sama sama sama sama sama sama sa		a. Bagi Lembaga Penjamin yang mem	iliki wilayal	n operasiona	l nasional at	tau provinsi	atau terdap	at kepemili	kan asing	
1 angesta Dewan Konsissis, atasa pemegang sabam Lembaga Penjamin, dahan Lembaga Penjamin, dahan Lembaga Penjamin, dahan Lembaga Penjamin dahan dahan menjada dahan menjada dahan penjaminan yang sama atasa leadan sebah siny yang memilika bubungan dahan kerama menjada bubungan dahan kerama penjaminan pen										
saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Renismin yang sama.	1									,
Pennimin vanga sama.	1						X			1
Komisaris Independent olidik pernah menjadi anagasta Direksia, anggota Dewis Romisaris, atata menduduki jabatam 1 (satu) (imjakat di bawah 2 Direksi pada tembaga Penjamin yang sama atata badan usaha kini yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin menjamit tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tersekitir. Komisaris Independen membanian peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan ulang, warish dan penjaminan, penjaminan ulang syarish dan penjaminan menjalakan ulang benjamin menjalakan ulang syarish penjaminan menjamiki komite audit marapya membantu bewan komisarish dan menansatikan dan dan ulang syarish penjaminan menansakan dan d										
anaggoto Direksi, anggoto Dewan Komisaris, atau mendutuki pistuan 1 (satul inglast di bawah 2 Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha kinyang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut daham kunu waktu 6 (emu) balan tersahit; Komisaris Independen memihami peraturan perundangan didangan di dalam penjaminan, penjaminan yaprahu, penjaminan ulang, dengan di dalam kunu penjaminan ulang, dengan di dalam kunu penjaminan di peraturan perundangan di dalam penjaminan, penjaminan yaprahu, penjaminan ulang, dengan di penjaminan, penjaminan waktu 6 (emu) badan usaha penjaminan, penjaminan yaprahu, penjaminan di penjaminan, penjaminan yaprahu, penjaminan di penjaminan, penjaminan yaprahu, penjaminan di penjaminan, penjaminan di penjaminan, dan dependen memiliki pengahahuan yapa bak mengerasi kondisi keuangan Lembaga Penjaminan dengan kepandan tugas pelok melikuban fungsi pengawasan utuga pokok melikuban fungsi pengawasan utuk sepusian kepandan tugas pengawasan utuk sepusian memiliki komita audit. Penjaminan memiliki komita audit. Penjaminan memiliki komita audit. Pengan kepandan memantiki komita audit. Pengan kepandan memantiki komita audit. Pengan kepandan pengapakan kepandan pengapakan kepandan pengapakan kepandan kepanda										
menduduki jabatan I (satu) tingkat di bawah Direksi pada tembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afilisai dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu (semam) bulan terabikir. Komisaris Independen membamin peraturan perundanga undangan di hidang penjaminan, penjaminan yaraka, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang, syarish dan peraturan perundang-undangan lain yang Romasarish penjaminan ulang, syarish dan peraturan perundang-undangan lain yang lampatan peraturan perundang-undangan lain yang penjamin mengena kondis keungan tembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimakaud menjabat. Komisaris Independen mempila pengawasan untuk menyuarakan kepentingan tenjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan laimya. Lembaga Penjamin memiliki komite audit. A Anggata komite audit memiliki kembilan dalam pelakananan tigas. Komite audit mampul membantu Dewan Komisa audit mampul membantu Dewan Komisa audit mampul membantu Dewan komise audit membantu Dewan komise audit mempantik Komiseris independen mempangka membantu Dewan komiseris Independen berkewanganganan penjanjamin membantu Dewan komiseris Independen Lembaga Penjanin mempungkapkan kepada tiri komisaris Independen Lembaga Penjanin										
2 Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usah atah yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kunun waktu 6 femah Juban tersakhir. Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang perjaminan, penjaminan yariah, penjaminan ulang, dan/atun penjaminan ulang, dan/atun penjaminan ulang, dan/atun penjaminan ulang, dan/atun penganinan ulang yariah dan peraturan perundangan di bidang penjaminan ulang, dan/atun pendangan di bidang penjaminan ulang, wariah dan peraturan perundangan hubangan kepanan dan peraturan perundangan hubangan kepanan dan peraturan perundangan hubangan hubangan kepanan dan dan peraturan perundangan kepanan hubangan kepanan dan dan perangka kepanan hubangan kepanan dan dan beraturan perundangan kepanan dan dan dan dan dan dan dan dan dan		, 50								
todadan usaha tain yang mentilisi hubungan afiliasi drogan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun wakitu 6 (rama) bulan terakhiri. Komisuris Independen mendamin peraturun peraturun perundang-undangan di bidang penjaminan, perjaminan ulang, penjaminan ulang syariah dan peraturun perundang-undangan lain yang televan. Komisuris Independen memiliki pengetahuan yang televan. Komisuris Independen memiliki pengetahuan yang televan. Komisuris Independen memiliki pengetahuan yang televan. Komisuris Independen mempu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan tutak menyarakan kepentingan telajami, penerimi jaminan, dan pemangku kepetinigan lainnya, and penangku kepetinigan lainnya, and penangku kepetinigan lainnya, senangku kepetinigan lainnya kepetini lainnya kepetinigan lainnya kepetinigan lainnya kepetini lainnya kepetin	2						x			1
adiliasi dengan Lembang Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam bluan terakhir. Komisaris Independen memahami peraturan perundangan di bidang perjaminan, a penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atun perjaminan ulang, dan/atun perjaminan ulang, dan/atun perjaminan ulang, dan/atun penjaminan ungan kemana dan penangka keungan Lembaga Penjamin mengat Komisaris Independen memilibi komita adali tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangka kepentingan lainnya. 6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit. 7 pelaksanaan tugas. 8 Komita sudit mampu membantu Dewan 8 Komisaris dalam memanatu dan memastikan efektivitas sistem pengadalam internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan 8 Komisaris dalam memanatu dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor desternal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan 8 Komisaris dalam memanatu Dewan 8 Komisaris dalam memanatu Dewan 8 Komisaris dalam memanatu Dewan 8 Komisaris dalam membantu Dewan 8 Komisaris dalam membantu Dewan 8 Komisaris indesternal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan 8 Komisaris indesternal. 8 Komisaris indesternal. 8 Komisaris indesternal. 8 Komisaris indesternal. 8 Komisaris independen membiliki Komisaris independen. 9 kelaksanaan tugas aktiva membantu Dewan 8 Komisaris independen memaliki Komisaris independen. 9 komisaris independen menjaminan penjaminan di hidang penjaminan. 1 komisaris independen menjaminan penjaminan di hidang penjaminan. 1 komisaris independen menjaminan penjaminan di hidang penjaminan. 1 kembaga Penjamin mengungkapkan kepada 1 koritas Jasa Keungan terkait pengunduran diri memampanjaka keungan palapin penjaminan. 1 kepada Otoritas Jasa Keungan terkait pengunduran diri memampanjaminan. 1 kepada Otoritas Jasa Keungan terkait pengunduran di	_									
dalam kurun waktu (enam) bulan terakhir. Komisaria halependen menabahani peraturan perundang-undang-undangan di bidang penjaminan, perjaminan ayariah, penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, ang peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Komisaria Independen memiliki pengetahuan yang relevan. Komisaria Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaria Independen dimakand menjabat. Komisaria Independen manpu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan turka menyarakana keperdingan terjamin, penerima jaminan, dan pentangku kepentingan lainnya. 6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit. 7 Anggota komite audit memiliki komite audit. 8 Anggota komite audit memiliki kambian dalam pelakasanan tugas. 8 Komite audit mempu menhantu Dewan Komisaria dalam mengendalian internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaria dalam menastikan efikitivitas sistem pengendalian internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaria dalam memantua dan memastikan kofisitivitas sistem pengendalian internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaria dalam membantu Dewan Komisaria Independen membantu Dewan Komisaria Independen membantu Dewan Komisaria Independen membantu Dewan Komisaria Independen membantu Bekukan penantuan dan dan dalam melakukan penantuan dan Cabana and Maria dalam membantu Dewan Komisaria Independen membantu Bekukan penandalam dalam membantu Bekukan penandalam dalam membantu Bekukan penandalam dalam dalam membantu Bekukan Pengandalam Independen mempangkapkan kepada Otorias Jasa Keungan peling lambat 10 tepuluh hari kalender sejak ditemukannya pelagangan mengangkapkan kepada Otorias Jasa Keungan terkati pengundurah diri kemasira Independen mengungkapkan kepada Otorias Jasa Keungan terkati pengun										
Komisaria Independen menahami peraturan perundangan dibidang penjaminan, perundangan dibidang penjaminan, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang kenganan peraturan perundang-undangan lain yang kengan perlawan kengenal kondis keungan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen memiliki pengetahuan Komisaris Independen mampu menjalankan tugas penjaminan kepentingan lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pengenakanan tugas penjaminan, dan penangalu kepentingan laininya.										
pernadang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Komisaria Independen memiliki pengetahuan apan baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaria Independen memiliki pengetahuan apan baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaria Independen dimaksud menjabat. Komisaria Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan laimwa, and pemangku kepentingan laimwa, and pemangku kepentingan laimwa. 6. Lembaga Penjamin memiliki komite audit: Anggota komite audit mampiliki kembilan dalam pelaksanaan tugas. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan ekkivitas sistem pengendalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam membantu dan memastikan ekkivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan audit dalam melakukan pemantatuan dan ewalasi atas perencanaan dan pelaksanaan tugas auditor internal dan audit dalam melakukan pemantatuan dan ewalasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam melakukan pemantatuan dan ewalasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam internal termasuk proses pelaparra keuangan. 11. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan rapat. 22. Lembaga Penjamin membantu Dewan Komisaris ladependen berkewargangaparan independen independen keditemukannya pelanggaran peraturan perundangan di bidong penjaminam. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampakan alasan terkait pengunduran diri komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampakan akasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait penberhentian										
Jangtatu penjaminan ulang syariah dan peraturan peraturan perundang-undangan lain yang televan. Komisaria Independen memiliki pengetahuan yang balik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamia tempat Komisaria Independen memiliki pengetahuan Penjamia Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungai pengawasan untuk menyanarkan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan muntuk menyanarkan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan mininyan untuk menyantakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan mininyan untuk menyantakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan mininyan untuk menyantakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan mininyan kepada kepada kepada dan sadira terjamia kepada k		• •								
dan/ atau penjaminan ulang syaraha dan peraturan perraturan peraturan perudangan di komisaris Independen melabata (monisaris dia memanta (monisaris dia monisaris (monisaris Independen den melaporkan (monisaris Independen melaporkan kepada (monisaris Independen mengangan gerapuran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan mengan mengan mengan diri komisaris Independen mengangan peraturan perundang-undangan di kemantan kepada (monisaris Independen mengangan peraturan perundang-undangan di kepada (monisaris Independen mengangan peraturan perundang-undangan di kepada (monisaris Independen mengangan peraturan perundang-undangan di kepada (monisaris Independen men	2									1
Felevan. Komisaris Independen memiliki pengetahuan Yang balik mengenai kondisi keuangan Lembaga Yang balik mengelahakan kepentingan lembaga Yang balik mengelahakanan kepentingan leminya. Yang balik mengelahakanan tugas Yang balik mengelahakan tugas Yang balik mengelahakanan tugas Yang balik mengelahakan tugas Yang	3	dan/atau penjaminan ulang syariah dan					X			1
Romisaris Independen memiliki pengetahuan Penjamin tempeta Komisaris Independen X										
4 yang balk mengenal kondisi keuangan Lembaga benjamin tempat Komisaris Independen dimakasud menjabat. Komisaris Independen mampu menjalakan tugas pokok melakukan fungai pengawasan tuntuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan penangku kepentingan laininya. 1 Lembaga Penjamin memiliki komite audit. 7 Anggota komite audit memiliki komite audit. 8 Komite audit mampu membantu Dewan komite audit mampu membantu Dewan komisaris dalam memantu dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan komisaris dalam memantu dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan komisaris dalam memantu dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan komisaris dalam memantu dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas pertenaman dan auditor eksternal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas pertenaman dan pelaksanaan and audit dalam rangka menlial kecukupan x 1 lambaga Penjamin memliki komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 1 Komite audit asearar rutin melakukan rapat. 2 Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelangaran peraturan perundang undangan di bidang penjaminan. 4 Komisaris Independen mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pangandalian kepada otoritas Jasa Keuangan panganduran diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri depada Otoritas Jasa Keuangan. 1 Comisa saa keuangan mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengangkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan kepada Otoritas Jasa										
4 Penjamin tempat Komisaris Independen dinaksud menjaharkan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan tugas komite audit memiliki kembian dalam pengakasanaan tugas. 6 Lembaga Penjamin membatu Dewan Komisaris dalam mematatu dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam mematatu dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor elesternal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam menlakukan penantauan dan cwaluasi atas perencanan dan pelaksananan an audit elalam rangka menilal kecukupan pengendalian internal ternasuk proses pelaporan keuangan. 1 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 4 Komite audit mampu membakukan rapat. 5 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 6 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen berkewarganegaraan pengagaran peragaran										
Penjamin tempat Komisaris Independen	4						x			1
Komisaris Independen mampu menjalankan nugas pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan laimnya. Anggota komite audit memiliki komite audit. X										
tutuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan penangku kepentingan lainan, lain penangku kepentingan lainan, lain penangku kepentingan lainanya. 6 Lembaga Penjamin memiliki kemite audit. 7 Angota komite audit memiliki kemite audit. 8 Komite audit mampu membantu Dewan 8 Komite audit mampu membantu Dewan 8 Komite audit mampu membantu Dewan 9 Komisaris dalam memantua dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. 9 Komite audit mampu membantu Dewan 1 Lombaga Penjamin memiliki kemiteran lainan dan dewata dan membantu Dewan 1 Lombaga Penjamin memiliki kemiteran lainan dan dewata dan membantu Dewan 1 Lombaga Penjamin memiliki kemiteran lainan dan dewata lainan dan kemiteran lainan dan dewata lainan dan dan dan dan dan dan dan dan dan										
5 untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya. 6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit. 7 nelaksanaan tugas. 8 Komite audit mampu membantu Dewan 9 Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal 9 Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal 9 Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal 9 Komisaris dalam membantu Dewan 9 Komisaris dalam membantu Dewan 9 Komisaris dalam membantu Dewan 9 Komisaris dalam melakukan pemantauan dan 10 audit dalam rangka menilai kecukupan 10 pengendalian internal termasuk proses 11 pengengendalian internal termasuk proses 12 pengengendalian internal termasuk proses 13 pengengendalian internal termasuk proses 14 pengaparan keuangan 15 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 16 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris 17 Independen berkewarganegaraan 18 Komisaris Independen berkewarganegaraan 19 Komisaris Independen berkewarganegaraan 10 Komisaris Independen melaporkan kepada 10 toritas Jasa Keuangan paling lambat 10 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya 10 pelanggaran peraturan perurudang-undangan di bidang penjaminan. 19 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 10 toritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri komisaris Independen yang mengundurkan diri 10 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri 11 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri 12 kepada Otoritas Jasa Keuangan kepada										
penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya. 6 Lembaga Penjamin memiliki komite audit. 7 Angota komite audit memiliki keahilan dalam pelaksanaan tugas. 8 Komite audit mampu membantu Dewan 8 Komisa sidalam memantua dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan 9 efektivitas sistem pengendalian internal. 8 Komisa sidalam memantua dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. 8 Komisa sidalam memantua dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal ternal dan auditor eksternal. 9 efektivitas pelaksanaan tugas suditor internal dan auditor eksternal. 10 komite audit mampu membantu Dewan komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menliai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris independen. 13 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 14 Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. 15 Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. 16 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen yang mengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri komisaris Independen yang mengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengu	_									
Sainova.	5						X			1
Anggota komite audit memiliki keahilan dalam pelaksanaan tugas.										
7 Anggota komite audit memiliki keahiian dalam pelaksanaan tugas. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keungan. Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelangaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri komisaris Independen yang mengundurkan diri komisaris Independen, komisari	_									
Techsiasanan tugas. X	ь						X			1
8 Komite audit mampu membantu Dewan 8 Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan 8 Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan 8 Komisaris dalam menantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. 8 Komite audit mampu membantu Dewan 8 Komisaris dalam melakukan pemantauan dan 9 evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan 10 audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Iembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. 8 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 13 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 14 Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 15 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. 16 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 17 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri Komisaris Independen yang mengunduran diri komisaris Independen y	7						x			1
8 Komisaris dalam memantau dan memastikan elektivitas sistem pengendalian internal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan elektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menlial kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit rangka menlial kecukupan x 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
efektivitas sistem pengendalian internal.	8	•					v			1
Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka memilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Komite audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada	0									1
9 efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen. Komisaris Independen mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran dir										
efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 14 Komisaris Independen berkomisili di Indonesia. 15 Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 16 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelangaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasas Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasas keuangan mengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen. Komisaris Independen mengungkapkan kepada Otoritas Jasas Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasas Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasas Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 10 Otoritas Jasas Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada	0	Komisaris dalam memantau dan memastikan								,
Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada O	9	efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal					X			1
Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. 13 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 14 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 15 Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. 16 Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 16 Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan lasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian		dan auditor eksternal.								
evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 13 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 14 Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen walaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otorit										
audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. 11 Komite audit secara rutin melakukan rapat. 12 Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. 13 Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. 14 Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. 15 Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. 16 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. 17 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. 18 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. 19 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 10 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 11 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. 10 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian										
pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Ikomite audit secara rutin melakukan rapat. Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian	10						x			1
Pelaporan keuangan.										
Komite audit secara rutin melakukan rapat. X										
Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen. Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada	11						x			1
12 Independen.		*								
Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen yang mengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan diri x 1 tembaga Penjamin mengungkapkan diri x 1 tembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada X 1 tembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1 tembaga Penjamin mengungkapkan kepada	12								x	1
Indonesia. Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian x 1 comparativa diri komisaris Independen yang mengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada										_
Komisaris Independen berdomisili di Indonesia. Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian x 1 x 1 x 1 x 1 x 1	13	Indonesia.							x	1
Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1										_
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian X 1 Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian	14								x	1
15 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 16 Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 18 Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian x 1		Komisaris Independen melaporkan kepada								
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian x 1		Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10								
bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian x 1	15	(sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya							x	1
bidang penjaminan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian x 1		pelanggaran peraturan perundang-undangan di								
Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian x 1 x 1										
16 Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen. Komisaris Independen yang mengundurkan diri 17 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian x 1 x 1 x 1 x 1 x 1										
Komisaris Independen yang mengundurkan diri 17 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 18 Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian x 1	16	Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran							х	1
Komisaris Independen yang mengundurkan diri 17 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 18 Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian x 1		diri Komisaris Independen.								
17 menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian x 1 x 1 x 1										
kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada 18 Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian x 1	17									,
Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian x 1	1/	menyampaikan aiasan terkait pengunduran diri							x	1
18 Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian x 1		kepada Otoritas Jasa Keuangan.								
		Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada								
Komisaris Independen.	18	Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian							х	1
		Komisaris Independen.								



B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

				Kriteria	/Indikator F	Penilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan								
19	pemberhentian Komisaris Independen Kepada							x	1
	Otoritas Jasa Keuangan.								
	Komisaris Independen melaporkan kepada								
	Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10								
20	(sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya							x	1
20	keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat							, x	1
	membahayakan kelangsungan usaha Lembaga								
	Penjamin.								
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite							x	1
21	audit.							X	1
22	Perusahaan memiliki struktur komite.							x	1
23	Komite audit memiliki program kerja komite.							x	1
20								Α	1
	Komite audit melaporkan realisasi terkait								
24	program kerja komite kepada Komisaris							x	1
	Independen.								

Nilai Faktor	1.00
Bobot	5.00
Total Indikator	24
Jumlah Skor Indikator	24



B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

		Kriteria/Indikator Penilaian									
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor		
	b. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional kabupaten										
1	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.					x			1		
2	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.					x			1		
3	Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.			x					3		
4	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.			x					3		
5	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.			x					3		
6	Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit.							x	1		
7	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.							х	1		
8	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.							x	1		
9	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.							x	1		
10	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.							x	1		

Nilai Faktor	5.00 1.60
Bobot	Г 00
Total Indikator	10
Jumlah Skor Indikator	16



C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

					a/Indikator P	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
			ıngsi kepa					•	
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu								
	memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur,								
1	serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin			x					3
	telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu				-	-			
2	memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen			x					3
	yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan								
	dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.								
	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi								
_	kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan								3
3	Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di			х					3
	bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya.								
	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi								
	kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan								
4	tugas kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi			х					3
	kepatuhan.								
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang						x		5
	membawahkan fungsi kepatuhan.								Ů
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang						x		5
	melaksanakan fungsi kepatuhan.							<u> </u>	
		2 Fund	si auditor	internal					
		Z. Fung	si auditoi	Internal					•
1	Perusahan memiliki auditor internal.						x		5
3	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit. Auditor internal memiliki struktur organisasi.						X	-	5 5
4	Auditor internal meniniki struktur organisasi. Auditor internal bersifat independen.						x x		5
	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit								
5	internal.						x		5
									•
		3. Fungs	si auditor	eksternal					
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						x		5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						x		5
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						x		5
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						x		5
	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan								
5							х		5
-	data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal. Auditor eksternal bersifat independen.							ļ	_
6	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas						X	1	5
7	informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal						x		5
	yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga)								
	tahun buku pelaporan secara berturut-turut.								
	Jumlah Skor Indikator								82
	Total Indikator								18
	Bobot								7.5
	Nilai Faktor								,.0

Jumlah Skor Indikator	82
Total Indikator	18
Bobot	7.50
Nilai Faktor	6.83



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

	Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
		1. Penga	awasan akt	if Dewan Ko	omisaris				
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.	x							5
2	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko.	х							5
3	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.	х							5
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.	x							5
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.	x							5
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja.	х							5
7	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuanittas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.	x							5
	2. Kecuk	upan kebija	ıkan, prose	dur, dan pe	netapan lin	nit risiko			
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin		. •	· •	-				
	sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin		x						4
	memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.							х	1
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.							x	1
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.							х	1
	3. Kecukupan proses	identifika	si, penguki	ıran, pemaı	ntauan dan	pengendali	an risiko		
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.					x			1
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh					x			1
	kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala.					х			1
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.					x			1
5	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.					x			1
6	toleransi risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.			1				x	1
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.							x	1
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.							х	1
		4. Sister	m informas	i manajeme	en risiko				
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi								
1	benioaga Fenjamin meminiki sistem monnasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.					x			1
2	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.					x			1



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko.					x			1
4	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.					x			1
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.					x			1
	zemsaga i enjamin								
	5.	Sistem per	ngendalian	intern yan	g menyelur	uh			
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.				х				2
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.			ı	ı	I	х		5
		6. Tat	a kelola te	knologi infe	ormasi				
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.			х					3
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.						х		5
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.						x		5
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (disaster recovery plan).						х		5

Ni	ilai Faktor	5.33
Bo	Bobot	10.00
To	otal Indikator	30
Ju	umlah Skor Indikator	80



E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	1. Pengungkapan mengenai keb	ijakan remu	nerasi dan f	asilitas lain l	bagi anggota	Direksi dan l	Dewan Komi	saris	
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai yang mendorong perilaku								
	berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		х						4
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.		x						4
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.		x						4
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (peer group).		x						4
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin.	х							5
6	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi dalam bentuk non natura.						х		5
7	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi dalam bentuk natura.							x	1
	2 Pengungh	anan nakat s	atan behilab	an ramiinara	si dalam 1 (s	atu) tahun			
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain	apan paket a	atau Kebijak	an remunera	or uaram 1 (s	acu, canun	ı	I	
1	bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan RUPS.						х		5
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan						x		5
3	remunerasi dan fasilitas lain. Jumlah anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang								
	menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.						х		5
		3. Ras	sio gaji terti:	ıggi dan tere	ndah				
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.						x		5
_	Jumlah Skor Indikator Total Indikator Bobot								2

Nilai Faktor	2.14
Bobot	2.50
Total Indikator	11
Jumlah Skor Indikator	47



F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

			Kriteria/Indikator Penilaian						
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.	x							5
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.	x							5
	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.	х							5
	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.	x							5
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.						x		5
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.						x		5

Jumlah Skor Indikator	30
Total Indikator	6
Bobot	15.00
Nilai Faktor	15.00



G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

				Kriteria/	Indikator	Penilaian	l		
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin menyusun								
	rencana jangka panjang Lembaga						X		5
	Penjamin.								
2	Lembaga Penjamin menyusun						x		5
	rencana kerja Lembaga Penjamin.								
3	Lembaga Penjamin menyusun								
	anggaran tahunan Lembaga						X		5
	Penjamin.								
4	Rencana jangka panjang serta								
	rencana kerja dan anggaran tahunan						x		5
	Lembaga Penjamin disampaikan						A		
	kepada Otoritas Jasa Keuangan.								

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	7.50
Nilai Faktor	7.50



H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima puluh per seratus) atau lebih

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai							x	1
	5% (lima per seratus) atau lebih pada								
	Lembaga Penjamin.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai							x	1
	5% (lima per seratus) atau lebih pada								
	Lembaga Penjamin lain.								
3	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai							x	1
	5% (lima per seratus) atau lebih pada							^	1
	perusahaan jasa keuangan selain								
	Lembaga Penjamin.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi								
	dan Dewan Komisaris yang mencapai								
	5% (lima per seratus) atau lebih pada							x	1
	Lembaga Penjamin lainnya yang							^	1
	berkedudukan di dalam maupun di								
	luar negeri, termasuk saham yang								
	diperoleh melalui bursa efek.								

Nilai Faktor	1.00
Bobot	5.00
Total Indikator	4
Jumlah Skor Indikator	4



I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi dan Dewan Komisaris

				Kriteria	/Indikator I	Penilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keuangan anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota								1
	Dewan Komisaris, dan/atau pemegang							X	1
	saham Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud menjabat.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota								1
	Dewan Komisaris, dan/atau pemegang							X	1
	saham Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud menjabat.								
3	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keuangan anggota Dewan								
	Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi,								1
	dan/atau pemegang saham Lembaga							х	1
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota Dewan								
	Komisaris dengan anggota Dewan								
	Komisaris lain, anggota Direksi,							x	1
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								

Jumlah Skor Indikator	4
Total Indikator	4
Bobot	5.00
Nilai Faktor	1.00



J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	1. Per	gunduran	diri atau p	emberhenti	ian auditoi	r eksternal			
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan								1
	terkait pengunduran diri auditor							х	1
	eksternal.								
2	Auditor eksternal yang mengundurkan								
	diri menyampaikan alasan terkait							x	1
	pengunduran diri kepada Otoritas							Α	1
	Jasa Keuangan.								
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor							x	1
	eksternal.								
4	Lembaga Penjamin menyampaikan								
	alasan pemberhentian auditor							x	1
	eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.								
	Acuangan.								
		2. Trans	aksi mater	ial dengan	pihak terka	ait			
1	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa						x		5
	Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.								
	dengan pinak iam.							l	<u> </u>
			3. Bentura	an kepentir	ngan				
1	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan						x		5
	kepentingan yang sedang berlangsung						X X		3
	dengan pihak lain.								
2	Lembaga Penjamin telah								
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga								
	Penjamin yang memiliki potensi						x		5
	benturan kepentingan dengan								
	Lembaga Penjamin lain.								
	4. Informasi material lain meng	enai Lemb	aga Penjan	iin yang te	rkait denga	n Tata Kei	ola Perusan	iaan yang E	saik
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik	x							5
2	Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal								
-	dalam Lembaga Penjamin.	x							5
3	Tidak terdapat permasalahan yang								
	merupakan dampak dari kebijakan	x							5
	remunerasi Lembaga Penjamin.		ļ			<u> </u>			<u> </u>
			5. Penyin	ıpangan int	tern				
1	Penyelesaian penyimpangan internal		-	-					
				x					3
2	melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang								-
2	dilakukan oleh anggota Dewan						x		5
	Komisaris dan anggota Direksi.								
3	Tidak terdapat penyimpangan yang						х		5
	dilakukan oleh pegawai tetap.						^		J



J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

				Kriteria	/Indikator F	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
4	Tidak terdapat penyimpangan yang						x		5
	dilakukan oleh pegawai tidak tetap.								Ů
5	Lembaga Penjamin menyediakan								
	mediasi penyelesaian terkait						x		5
	penyimpangan internal.								
			6. Permas	alahan huk	tum				
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
	permasalahan hukum yang						x		5
	merupakan kasus perdata.								
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
	permasalahan hukum yang						x		5
	merupakan kasus pidana.								
	·								



J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

				Kriteria	/Indikator F	Penilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
			7. Et	ika bisnis					
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	x							5
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.	x							5
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.							x	1

Jumlah Skor Indikator	78
Total Indikator	20
Bobot	12.50
Nilai Faktor	9.75



K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (self assessment)

Berdasarkan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT Jamkrida Jabar meraih nilai 77,04 (tujuh puluh tujuh koma kosong empat) dengan predikat "Baik"

LAMPIRAN

KERTAS KERJA PENILAIAN SECARA MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
UNIT USAHA SYARIAH



Penilaian secara mandiri (self assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah

Pengantar:

- 1. Sesuai dengan SE OJK No. XX/SEOJK.05/2017, kuesioner ini merupakan salah satu ketentuan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
- 2. Kuesioner ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin yaitu Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.
- 3. Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Petunjuk Pengisian:

- 1. Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
- 2. Berilah tanda silang (X) pada kolom 1 Sangat Sesuai, 2 Sesuai, 3 Cukup Sesuai, 4 Kurang Sesuai dan 5 Tidak Sesuai atau pada kolom Ya dan Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 3. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/pernyataan di masing-masing faktor yang ada.
- 4. Kuesioner ini terdiri dari 10 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/pernyataan terkait penilaian atas faktor tersebut.
- 5. Format A sampai dengan Format J merupakan pengisian untuk masing-masing dari 10 faktor sesuai dengan ketentuan, dan Format K merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (self assessment).
- 6. Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati, dan sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin sebenarnya.

Rincian Nilai Bobot Indikator

No	Faktor	Bobot (%)	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	35.00	Lihat "Format A"
2	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:		
	a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem	5.00	Lihat "Format B1" atau "Format B2" (isi salah satu sesuai ketentuan)
3	pengendalian internal. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7.50	Lihat "Format C"
4	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi.	10.00	Lihat "Format D"
5	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2.50	Lihat "Format E"
6	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	15.00	Lihat "Format F"

7	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran	7.50	Lihat "Format G"
	tahunan.		
8	Pengungkapan kepemilikan saham.	2.50	Lihat "Format H"
9	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga		
	anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS		
	dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain,	5.00	Lihat "Format I"
	anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga	3.00	Linat Format I
	Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,		
	dan anggota DPS dimaksud menjabat.		
10	Pengungkapan hal-hal penting lainnya.	10.00	Lihat "Format J"
	JUMLAH	100.00	



Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Format	Nilai
1	A	30.16
2	B1	1.00
4	B2	1.00
3	С	7.17
4	D	8.40
5	E	1.68
6	F	12.50
7	G	7.50
8	Н	0.50
9	I	1.00
10	J	6.30
	Total Nilai	77.21
	Predikat	Baik





A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

				Kriteri	a/Indikator P	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. Di	reksi	DUSUMA	1	1		1			
	Direksi memiliki pengetahuan								
1	yang relevan dengan jabatan		X						4
	sebagai Direksi.								
	Direksi mampu bertindak dengan								_
2	itikad baik, jujur dan profesional.	X							5
	Direksi bertindak untuk								
3	kepentingan Lembaga Penjamin,	x							5
	terjamin, dan/atau penerima jaminan.								
	Jamman. Direksi mendahulukan								
	kepentingan Lembaga Penjamin,								
4	terjamin, dan/atau penerima	X							5
	jaminan, daripada kepentingan pribadi.								
	Direksi mampu mengambil								
	keputusan berdasarkan penilaian								
5	independen dan objektif untuk		x						4
	kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima								
	jaminan.								
	Direksi mampu menghindarkan								
	penyalahgunaan kewenangan								
	untuk mendapatkan keuntungan								
6	pribadi yang tidak semestinya	X							5
	atau menyebabkan kerugian bagi								
	Lembaga Penjamin. Direksi menjamin pengambilan								
	keputusan yang efektif, tepat, dan								
	cepat serta dapat bertindak								
7	secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang	x							5
-	dapat mengganggu								
	kemampuannya untuk								
	melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.								
	Direksi mematuhi peraturan								
	perundang-undangan, anggaran								
8	dasar, dan peraturan internal lain	x							5
	dari Lembaga Penjamin dalam								
	melaksanakan tugasnya.								
	Direksi mengelola Lembaga								
9	Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung	x							5
	jawabnya.								
	Direksi mampu								
10	mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada	x							5
	RUPS.								
	Direksi telah memastikan agar								
	Lembaga Penjamin								
11	memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya		x						4
	kepentingan terjamin dan/atau								
	penerima jaminan.								
	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan								
12	lengkap mengenai Lembaga		x						4
	Penjamin kepada Dewan								
	Komisaris dan DPS.			<u> </u>					



A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sammat	2	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
		Sangat Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	1a	Tiuak	
	Direksi telah membantu								
	memenuhi kebutuhan DPS dalam								
	menggunakan anggota komite,								2
13				х					3
	tenaga ahli profesional yang								
	struktur organisasinya berada								
	dibawah Direksi. Direksi mampu menghindarkan								
	transaksi yang mempunyai								
	benturan kepentingan dengan								
14	kegiatan Lembaga Penjamin		X						4
	tempat anggota Direksi dimaksud								
	menjabat.								
	Direksi mampu untuk tidak								
	memanfaatkan jabatannya pada								
	Lembaga Penjamin tempat								
	anggota Direksi dimaksud								
15	menjabat untuk kepentingan			x					3
13	pribadi, keluarga, dan/atau pihak			^					3
	lain yang dapat merugikan atau								
	mengurangi keuntungan Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Direksi								
	dimaksud menjabat.								
	Direksi mampu untuk								
	menghindari perbuatan								
	mengambil dan/atau menerima								
16	keuntungan pribadi dari Lembaga								4
10	Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain		х						4
	remunerasi dan fasilitas yang								
	ditetapkan berdasarkan								
	keputusan RUPS.								
	Direksi mampu untuk menolak								
	permintaan pemegang saham								
	yang terkait dengan kegiatan								
17			x						4
	tempat anggota Direksi dimaksud								
	menjabat selain yang telah								
	ditetapkan dalam RUPS. Hasil rapat Direksi secara rutin								
18			x						4
	rapat Direksi.								
	Risalah rapat yang merupakan								
19	keputusan bersama seluruh	x							5
	anggota Direksi telah								
	didokumentasikan dengan baik.								
	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah								
20	· ·		x						4
	pendapat (dissenting opinions)		**						,
	yang terjadi secara jelas.								
0.1	Anggota Direksi Lembaga								-
21	Penjamin berdomisili di Indonesia.						x		5
	Lembaga Penjamin yang								
	didalamnya terdapat kepemilikan								
	asing baik secara langsung								
22	maupun tidak langsung memiliki							x	1
44	paling sedikit 50% (lima puluh							^	1
	per seratus) anggota Direksi yang								
	merupakan warga negara								
<u> </u>	Indonesia.						L	<u> </u>	



A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Direksi berkewarganegaraan asing	~~~							
23	memiliki surat izin menetap dari							x	1
	instansi yang berwenang.								
24	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari							x	1
	instasi berwenang.								
25	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.						х		5
	Anggota Direksi Lembaga								
26	Penjamin tidak merangkap						x		5
	jabatan pada Lembaga Penjamin								
	atau badan usaha lain.								
	Anggota Direksi tidak berasal dari								_
27	pegawai atau pejabat aktif						Х		5
	Otoritas Jasa Keuangan. Direksi Lembaga Penjamin								
	menyelenggarakan rapat Direksi								
28							x		5
	secara berkala paling sedikit 1								
	(satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Direksi Lembaga Penjamin								
	menghadiri rapat Direksi paling								
29									5
29	sedikit 50% (lima puluh per						х		5
	seratus) dari jumlah rapat Direksi								
	dalam periode 1 (satu) tahun. Jumlah rapat Direksi yang telah								
	diselenggarakan dan jumlah								
30	kehadiran masing-masing anggota						x		5
	Direksi perusahaan harus dimuat								
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								
2. D	ewan Komisaris								
	Dewan Komisaris mampu								
1	melaksanakan tugas pengawasan	x							5
	dan pemberian nasihat kepada								
	Direksi. Dewan Komisaris mampu								
0	mengawasi Direksi dalam								_
2	menjaga keseimbangan	Х							5
	kepentingan semua pihak.								
	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan								
3	Tata Kelola Perusahaan yang			х					3
	Baik.								
	Dewan Komisaris mampu	-							
	memberikan persetujuan dalam								
4	hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur	x							5
	organisasinya berada di bawah								
	Dewan Komisaris.								
	Dewan Komisaris mampu								
	memastikan bahwa Direksi telah								
	menindaklanjuti temuan audit								
	dan rekomendasi dari satuan								
5	kerja audit internal Lembaga	x							5
	Penjamin, auditor eksternal, hasil								
	pengawasan Otoritas Jasa								
	Keuangan dan/atau hasil								
	pengawasan otoritas lain.		J	1	<u> </u>	<u> </u>			



		Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
	Anggota Dewan Komisaris mampu	~~~								
	untuk tidak melakukan transaksi									
	yang mempunyai benturan									
6	kepentingan dengan kegiatan	x							5	
	Lembaga Penjamin tempat									
	anggota Dewan Komisaris									
	dimaksud menjabat.									
	Anggota Dewan Komisaris mampu									
	untuk tidak memanfaatkan									
	jabatannya pada Lembaga									
	Penjamin tempat anggota Dewan									
	Komisaris dimaksud menjabat									
7	untuk kepentingan pribadi,	x							5	
	keluarga, dan/atau pihak lain									
	yang dapat merugikan atau									
	mengurangi keuntungan Lembaga									
	Penjamin tempat anggota Dewan									
	Komisaris dimaksud menjabat.									
	Anggota Dewan Komisaris mampu									
	untuk menghindari perbuatan									
	mengambil dan/atau menerima									
	keuntungan pribadi dari Lembaga									
8	Penjamin tempat anggota Dewan	х							5	
Ü	Komisaris dimaksud menjabat,								Ü	
	selain remunerasi dan fasilitas									
	yang ditetapkan berdasarkan									
	keputusan RUPS. Anggota Dewan Komisaris mampu									
	untuk tidak mencampuri kegiatan									
9	operasional Lembaga Penjamin	x							5	
	yang menjadi tanggung jawab									
	Direksi.									
10	Hasil rapat Dewan Komisaris								4	
10	dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.		X						4	
	Risalah rapat yang merupakan									
	keputusan bersama seluruh									
11	anggota Dewan Komisaris telah	x							5	
	didokumentasikan dengan baik. Keputusan Dewan Komisaris telah						-			
	dituangkan ke dalam risalah									
12	rapat, termasuk perbedaan			x					3	
	pendapat (dissenting opinion) vang teriadi secara ielas.									
	Dewan Komisaris mampu									
	menjamin pengambilan									
13	keputusan yang efektif, tepat, dan	x							5	
10	cepat serta dapat bertindak								G	
	secara independen dalam									
	melaksanakan tugas. Lembaga Penjamin memiliki			<u> </u>						
	paling sedikit 2 (dua) orang						x		5	
	anggota Dewan Komisaris.									
	Lembaga Penjamin memiliki									
15	paling sedikit 1 (satu) Dewan						x		5	
_	Komisaris yang berdomisili di								_	
	Indonesia. Anggota Dewan Komisaris yang									
16	berkewarganegaraan asing							x	1	
	memiliki surat izin bekerja dari									
	instansi berwenang.									



				Kriteri	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	Anggota Dewan Komisaris yang	SUSUU.							
17	berkewarganegaraan asing								1
17	memiliki surat izin menetap dari							х	1
	instansi berwenang.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
18	rangkap jabatan sebagai anggota						x		5
	Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau								
	badan usaha lain.								
	Anggota Dewan Komisaris tidak								
19	berasal dari pegawai atau pejabat						x		5
	aktif Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris								
	menyusun laporan kegiatan								
20	Dewan Komisaris yang						x		5
20	merupakan bagian dari laporan						^		
	penerapan Tata Kelola								
	Perusahaan yang Baik. Anggota Dewan Komisaris								
	Lembaga Penjamin								
21	menyelenggarakan rapat Dewan						x		5
	Komisaris paling sedikit 1 (satu)						A		
	kali dalam 3 (tiga) bulan.								
	Anggota Dewan Komisaris								
	menghadiri rapat Dewan								
	Komisaris paling sedikit 75%								
22							x		5
	dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu)								
	tahun.								
	Jumlah rapat Dewan Komisaris								
	yang telah diselenggarakan dan								
	jumlah kehadiran masing-masing								
23	anggota Dewan Komisaris dimuat						х		5
	dalam laporan penerapan Tata								
	Kelola Perusahaan yang Baik.								
3. D	PS								
	DPS mampu bertindak sebagai								
	wakil Perusahaan Penjaminan								
	Syariah, Perusahaan Penjaminan								
1	Ulang Syariah, atau Perusahaan		x						4
-	Penjaminan yang memiliki unit		A						
	usaha syariah pada Dewan								
	Syariah Nasional - Majelis Ulama								
	Indonesia. DPS mampu bertindak dengan								
2	Dr 3 manipu bertindak dengan	x							5
	itikad baik, jujur, dan profesional.								
	DPS mampu bertindak untuk								
	kepentingan Perusahaan								
	Penjaminan Syariah, Perusahaan								
3	Penjaminan Ulang Syariah, atau	x							5
	Perusahaan Penjaminan yang								1
	memiliki unit usaha syariah								1
	dan/atau pemangku kepentingan								1
	lainnya.			1	ĺ	1			



No	Pernyataan/Pertanyaan			Kriteria/Indikator Penilaian								
	1 ornyutuun, 1 ortunyuun	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor			
	DPS mampu mendahulukan											
	kepentingan Perusahaan											
	Penjaminan Syariah, Perusahaan											
	Penjaminan Ulang Syariah, atau								4			
	Perusahaan Penjaminan yang		Х						4			
	memiliki unit usaha syariah											
	dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan											
	pribadi.											
	DPS mampu mengambil											
	keputusan berdasarkan penilaian											
	yang independen dan objektif											
	untuk kepentingan Perusahaan											
	Penjaminan Syariah, Perusahaan											
5	Penjaminan Ulang Syariah, atau	x							5			
	Perusahaan Penjaminan yang											
	memiliki unit usaha syariah											
	dan/atau pemangku kepentingan											
	lainnya.											
	DPS mampu menghindarkan											
	penyalahgunaan kewenangan											
	untuk mendapat keuntungan											
	pribadi yang tidak semestinya											
6	atau menyebabkan kerugian bagi								5			
0	Perusahaan Penjaminan Syariah,	Х							5			
	Perusahaan Penjaminan Ulang											
	Syariah, atau Perusahaan											
	Penjaminan yang memiliki unit											
	usaha syariah.											
	DPS mampu menjamin pengambilan keputusan yang											
	efektif, tepat, dan cepat, serta											
	bertindak secara independen,								-			
	tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu	х							5			
	kemampuannya untuk											
	melaksanakan tugas secara											
	mandiri dan objektif. DPS mampu melaksanakan tugas											
	pengawasan dan pemberian											
	nasihat serta saran kepada											
	•											
	Direksi agar kegiatan Perusahaan											
	Penjaminan Syariah, Perusahaan		Х						4			
	Penjaminan Ulang Syariah, atau											
	Perusahaan Penjaminan yang											
	memiliki unit usaha syariah											
	sesuai dengan prinsip syariah.											
	Risalah rapat yang merupakan											
9	keputusan bersama seluruh				x				2			
	anggota DPS telah											
	didokumentasikan dengan baik.											
	Keputusan DPS telah dituangkan											
	ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting</i>				x				2			
	opinions) yang terjadi secara				^							
	jelas.					<u> </u>						
	Anggota DPS mampu untuk tidak											
	melakukan transaksi yang											
	mempunyai benturan kepentingan											
111	dengan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan	x							5			
	Penjaminan Ulang Syariah, dan											
	unit usaha syariah tempat											
	anggota DPS dimaksud menjabat.											



				Kriteria	a/Indikator Pe	enilaian			
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
12	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan mengurangi keuntungan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud	х							5
13	menjabat. Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.	x							5
14	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah, dan paktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, dan		x						4
15	unit usaha syariah. DPS melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan prinsip syariah oleh Direksi.					x			1
16	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah.					x			1
17	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.						х		5
18	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.						x		5



		Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
19	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan						x		5	
	Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah. Anggota DPS tidak memiliki									
20	rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga						x		5	
21	keuangan syariah lainnya. DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan kegiatan penjaminan syariah dan						x		5	
	penjaminan ulang syariah. DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad penjaminan									
22	syariah dan penjaminan ulang syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						х		5	
23	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						x		5	
24	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi.						x		5	
25	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah secara lengkap dan tepat waktu.						x		5	
26	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.						x		5	
27	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS.						х		5	



			Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
28	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						x		5	

Jumlah Skor Indikator	349
Total Indikator	81
Bobot	35.00
Nilai Faktor	30.16



B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	a. Bagi Lembaga Penjamin yang	memiliki wil	ayah operasio	onal nasional	atau provinsi	atau terdapa	t kepemilikaı	n asing	
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama.					x			1
2	Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.					x			1
3	Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.					x			1
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.					x			1
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.					x			1
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.					х			1
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.					x			1
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.					x			1
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.					x			1
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses					x			1
11	pelaporan keuangan. Komite audit secara rutin melakukan rapat.					x			1
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.							x	1
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia. Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.							x	1
14	•							х	1
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.							x	1
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.							х	1
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.							x	1
18	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.							х	1
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.							х	1
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.							x	1



B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

		Kriteria/ Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.							x	1
22	Perusahaan memiliki struktur komite.							x	1
23	Komite audit memiliki program kerja komite.							x	1
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.							x	1

Jumlah Skor Indikator	24
Total Indikator	24
Bobot	5.00
Nilai Faktor	1.00



B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	b. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional kabupaten								
1	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.					x			1
2	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.					x			1
3	Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.					x			1
4	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.					x			1
5	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.					x			1
6	Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit.							x	1
7	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.							x	1
8	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.							x	1
9	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.							x	1
10	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.							x	1

Nilai Faktor	1.00
Bobot	5.00
Total Indikator	10
Jumlah Skor Indikator	10



C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

				Kriteri	a/Indikator P	enilaian				
No	Pernyataan/Pertanyaan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor	
			ngsi kepa	•						
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu									
	memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur,									
1	serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin		x						4	
	telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.									
	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu									
	memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen									
2	yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan		x						4	
	dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.									
	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi									
	kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan									
3	Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di		x	x						4
	bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan									
	lainnya. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi				-					
	kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan									
4	tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi		x						4	
	kepatuhan.									
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang						x		5	
Ü	membawahkan fungsi kepatuhan.						^		J J	
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang						x		5	
	melaksanakan fungsi kepatuhan.							1		
		2. Fung	si auditor	internal						
1	Perusahan memiliki auditor internal.						x		5	
	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						X	-	5	
	Auditor internal memiliki struktur organisasi.						x		5	
	Auditor internal bersifat independen.						x		5	
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit						x		5	
	internal.									
		2 E		-141						
		o. rungs	auditor	eksternal					,	
	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						x	 	5	
	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						x x	 	5 5	
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						X	 	5	
	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan									
5							x		5	
	data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.								ļ	
6	Auditor eksternal bersifat independen.						х		5	
	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas									
7	informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal						x		5	
	yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga)									
	tahun buku pelaporan secara berturut-turut.							<u> </u>	<u> </u>	
	Jumlah Skor Indikator								86	
	Total Indikator								18	
	Bobot								7.50	
	Nilai Faktor								7.17	



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

					a/Indikator P	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat	2	3 Cukup	4 Kurang	5 Tidak	Ya	Tidak	Skor
		Sesuai 1 Penge	Sesuai	Sesuai if Dewan K	Sesuai omisaris	Sesuai			
	<u></u>	1. Feliga	awasan akt	ii Dewali K	Ullisalis	1			
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga		x						4
	Penjamin.		Α.						1
2	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin								
	memberikan arahan yang jelas terkait penerapan		x						4
3	manajemen risiko. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin								
	melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara		x						4
	aktif.								
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di		x						4
	Lembaga Penjamin.		A						i '
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin								
	memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.		х						4
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin								
	menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas		x						4
			**						
7	pada masing-masing satuan kerja. Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin								
	memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas		x						4
	sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.								
	ponorapan manajemen noiko oceata etektii.								
	3. Kecuki	ıpan kebija	kan, prose	dur. dan pe	netapan lin	nit risiko			
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin		, , , , , , ,	T	1	1			
1	sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga	x							5
	Penjamin.								
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin								_
	memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						х		5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses						x		5
4	untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin								-
4	memperhatikan penetapan limit risiko dalam						x		5
	pengelolaan risiko.								
	4. Kecukupan proses	identifika	si, penguku	ıran, pemaı	ıtauan, dan	pengendal	ian risiko		
	<u> </u>				,				
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.		x						4
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem								
	untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh		x						4
	•		A						
3	kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan. Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko								
	secara berkala.		х						4
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur		x						4
5	pemantauan risiko. Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian								
Ü	atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko								
	maupun tingkat risiko yang akan diambil dan		х						4
6	toleransi risiko. Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin								
O	memperhatikan kecukupan proses identifikasi						x		5
	dalam pengelolaan risiko.								
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin								_
	memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.						х		5
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin								
	memperhatikan pemantauan dan pengendalian						x		5
	risiko.								
		5 Sinto	m informa	i manajem	en ricibo				
	[v	o. Sistei	ıı ınıormas	т тапајет	on fisiko	T			
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan								
	karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan			x					3
	usaha perusahaan.								
_	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki								
2				1	1	l			1
2	Lembaga Penjamin mampu mendukung								1
2	mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian		x						4



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

				Kriteri	a/Indikator P	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
3	Sistem informasi manajemen risiko mampu								
	memastikan tersedianya informasi yang akurat,								
	lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat								_
	diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan			х					3
	Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam								
	penerapan manajemen risiko.								
4									
	memastikan efektivitas penerapan manajemen			x					3
	risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan			Α.					3
	penetapan limit risiko.								
5	Sistem informasi manajemen risiko mampu								
	memastikan tersedianya informasi tentang hasil								
	(realisasi) penerapan manajemen risiko		x						4
	dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh								
	Lembaga Penjamin.								



D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

				Kriteri	a/Indikator P	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	6.	Sistem per	ngendalian	intern yanş	g menyelur	uh			
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem								
	pengendalian intern secara efektif dalam penerapan			x					3
	manajemen risiko Lembaga Penjamin.								
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh								
	memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal						x		5
	terjadi penyimpangan.								
		7. Tat	a kelola te	knologi info	ormasi				
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola								_
	teknologi informasi yang efektif.			х					3
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi								5
	sistem informasi.						х		5
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan								
	sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi						x		5
							_ ^		o o
	atau perintah kerja untuk setiap fungsi.								
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen								
	pengamanan data dan insiden (disaster recovery						x		5
	plan).							L	
	Jumlah Skor Indikator								126

ſ	Nilai Faktor	8.40
L	Bobot	10.00
	Total Indikator	30
	Jumlah Skor Indikator	126



E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

					a/Indikator P				
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
	1. Pengungkapan mengenai kebijak		asi dan fasil				Komisaris,	dan DPS	
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan								
	remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan								
	Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong								
	perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent								
	behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka			x					3
	panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil								
	terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan								
	dan/atau pemangku kepentingan lainnya.								
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja								
	keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga								3
	Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan			х					3
	perundang-undangan yang berlaku.								
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja			x					3
4	individual. Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran						-		
+	dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan			x					3
	yang setara (peer group).								
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan								
	sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga			x					3
	Penjamin.								
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.						x		5
7	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS								
	menerima remunerasi dalam bentuk natura.							x	1
	2. Pengungka	apan paket a	tau kebijak	an remunera	si dalam 1 (s	satu) tahun			
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain								
	bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS						x		5
2	yang ditetapkan RUPS.								
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota								
	Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit								
	mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota						x		5
	Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah								
	seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.								
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS								
	yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu)						x		5
	tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat								
-	penghasilan.								
		3. Ras	io gaji tertir	nggi dan tere	ndah				
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji								,
	tertinggi dan terendah.							х	1
_	Jumlah Skor Indikator								
	Total Indikator								
	Bobot								2
	Nilai Faktor								1.



F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

				Kriteria	/Indikator Pe	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.		x						4
	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.		x						4
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.		x						4
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain,			x					3
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.						x		5
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.						x		5

L	Bobot Nilai Faktor	15.00 12.50
	Total Indikator	6
	Jumlah Skor Indikator	25



G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

				Kriteria	A/Indikator Pe	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.						x		5
-	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin						x		5
	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.						x		5
4	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						х		5

Jumlah Skor Indikator	20
Total Indikator	4
Bobot	7.50
Nilai Faktor	7.50



H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih

				Kriteria	A/Indikator Pe	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang							x	1
	mencapai 5% (lima per seratus) atau								
_	lebih pada Lembaga Penjamin.								
2	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang							x	1
	mencapai 5% (lima per seratus) atau								
	lebih pada Lembaga Penjamin lain.								
3	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang							x	1
	mencapai 5% (lima per seratus) atau							^	1
	lebih pada perusahaan jasa keuangan								
	selain Lembaga Penjamin.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	kepemilikan saham anggota Direksi,								
	Dewan Komisaris, dan DPS yang								
	mencapai 5% (lima per seratus) atau							x	1
	lebih pada Lembaga Penjamin lainnya							^	1
	yang berkedudukan di dalam maupun								
	di luar negeri, termasuk saham yang								
	diperoleh melalui bursa efek.								

Jumlah Skor Indikator	4
Total Indikator	4
Bobot	2.50
Nilai Faktor	0.50



I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

	Kriteria/Indikator Penilaian								
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 2 3 4 5							Skor
		Sangat Sesuai	Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1	Lembaga Penjamin melaporkan	Sesuai		Scauar	ocsuai	Scauai			
	hubungan keuangan anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota								
	Dewan Komisaris, anggota DPS,							x	1
	dan/atau pemegang saham Lembaga								_
	Penjamin tempat anggota Direksi								
2	dimaksud menjabat. Lembaga Penjamin melaporkan								
_	hubungan keluarga anggota Direksi								
	dengan anggota Direksi lain, anggota								
	Dewan Komisaris, anggota DPS,							х	1
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Direksi								
	dimaksud menjabat.								
3	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keuangan anggota Dewan								
	Komisaris dengan anggota Dewan								
	Komisaris lain, anggota Direksi, DPS,							x	1
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota Dewan								
	Komisaris dimaksud menjabat.								
4	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota Dewan								
	Komisaris dengan anggota Dewan								
	Komisaris lain, anggota Direksi, DPS,							x	1
	dan/atau pemegang saham Lembaga								_
	Penjamin tempat anggota Dewan								
5	Komisaris dimaksud menjabat. Lembaga Penjamin melaporkan								
0	hubungan keuangan anggota DPS								
	dengan anggota DPS lain, anggota								
	Direksi, anggota Dewan Komisaris,							x	1
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota DPS								
	dimaksud menjabat.								
6	Lembaga Penjamin melaporkan								
	hubungan keluarga anggota DPS								
	dengan anggota DPS lain, anggota								l .
	Direksi, anggota Dewan Komisaris,							x	1
	dan/atau pemegang saham Lembaga								
	Penjamin tempat anggota DPS								
<u> </u>	dimaksud menjabat.							I .	1

Jumlah Skor Indikator Total Indikator	6
	6
Bobot	5.00
Nilai Faktor	1.00



J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

				Kriteria	a/Indikator P	enilaian			
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal									
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait							x	1
2	pengunduran diri auditor eksternal. Auditor eksternal yang mengundurkan								
	diri menyampaikan alasan terkait								1
	pengunduran diri kepada Otoritas Jasa							x	1
3	Keuangan. Lembaga Penjamin mengungkapkan								
	kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait							x	1
	pemberhentian auditor eksternal.								
4	Lembaga Penjamin menyampaikan								
	alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa							x	1
	Keuangan.								
		2.1	`ransaksi ma	terial dengar	nihak terka	it			
1	Lembaga Penjamin telah				- p				
	mengungkapkan kepada Otoritas Jasa						x		5
	Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.								
			3. Bent	uran kepent	ingan		1	T	
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa								
	Keuangan terkait benturan							x	1
	kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.								
2	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa								
	Keuangan terkait transaksi Lembaga							x	1
	Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga							1	1
	Penjamin lain.								
	4. Informasi material lain	mengenai I	embaga Pen	jamin yang t	erkait denga	n Tata Kelol	a Perusahaai	n yang Baik	
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik			x					3
2	Lembaga Penjamin. Tidak terdapat perselisihan internal			-					
	dalam Lembaga Penjamin.		х						4
3	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan			x					3
	remunerasi Lembaga Penjamin			ļ					
			5 Pen	yimpangan ii	ntern				
1	Penyelesaian penyimpangan internal		J. Fell	,pangan II	1	<u> </u>			
•						x			1
2	melibatkan proses hukum. Tidak terdapat penyimpangan yang							1	
4	dilakukan oleh anggota Dewan						x		5
3	Komisaris dan anggota Direksi. Tidak terdapat penyimpangan yang								
	dilakukan oleh pegawai tetap.						х		5
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.						x		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan								_
	mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.						х		5
							•		•
			6. Perr	nasalahan hu	ıkum				
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan		6. Perr	nasalahan hu	ıkum		x		5



J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

		Kriteria/Indikator Penilaian							
No	Pertanyaan/Pernyataan	1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki								
	permasalahan hukum yang merupakan						x		5
	kasus pidana.								
				B					
			7.	Etika bisnis					
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan								
	karyawan Lembaga Penjamin mampu								
	untuk tidak menawarkan atau								
	memberikan sesuatu, baik langsung								
	maupun tidak langsung kepada pihak								3
	lain, untuk mempengaruhi			x					3
	pengambilan keputusan yang terkait								
	dengan transaksi penjaminan, dengan								
	melanggar ketentuan perundang-								
	undangan yang berlaku.								
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan								
	karyawan perusahaan mampu untuk								
	tidak menerima sesuatu untuk								
	kepentingan pribadinya dengan			х					
	melanggar ketentuan perundang-								3
	undangan yang berlaku, baik langsung								
	maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi								
	pengambilan keputusan yang terkait								
	dengan transaksi pembiayaan.								
3									
	tentang perilaku etis, yang memuat								
	nilai etika berusaha sebagai panduan						x		5
	bagi organ Lembaga Penjamin dan								
	seluruh karyawan Lembaga Penjamin.								

Jumlah Skor Indikator	63
Total Indikator	20
Bobot	10.00
Nilai Faktor	6.30



K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (self assessment)

Berdasarkan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah meraih nilai 77,21 (tujuh puluh tujuh koma dua puluh satu) dengan predikat "Baik"

